

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PUTRPKP TAHUN 2025 - 2029



**DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TAKALAR**



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Takalar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

4. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7069);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Takalar.
2. Bupati adalah Bupati Takalar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan dokumen penjabaran dari strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra-PD menjadi pedoman PD dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Pasal 4

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas Renstra :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle;
- f. Dinas Kesehatan;
- g. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan dan Permukiman;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- u. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- v. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- x. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- cc. Kecamatan Pattallassang;
- dd. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
- ee. Kecamatan Polongbangkeng Utara;
- ff. Kecamatan Mangarabombang;
- gg. Kecamatan Mappakasunggu;
- hh. Kecamatan Sanrobone;
- ii. Kecamatan Galesong Selatan;
- jj. Kecamatan Galesong;
- kk. Kecamatan Galesong Utara;
- ll. Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
- mm. Kecamatan Laikang; dan
- nn. Kecamatan Polongbangkeng Timur.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, *19 september 2025*
BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, *19 september 2025*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR **24**



KATA PENGANTAR

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPPK) Kabupaten Takalar sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Dinas PUTRPPK Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 berdasar pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dikarenakan periode Kepemimpinan Kepala Daerah periode 2024 telah berakhir di Tahun 2024 serta sebagai wujud realisasi Perencanaan Pembangunan dan untuk memberikan informasi kepada seluruh stakeholder dalam periode transisi empat tahunan itu.

Dengan penyusunan Rencana Strategis ini dapat diketahui mengenai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar selama tiga tahun ke depan masa transisi kepemimpinan kepala Daerah dari Tahun 2025-2029 tentunya mengacu kepada regulasi yang berlaku, dokumen ini pula menjadi wadah untuk menselaraskan Regulasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41); dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan tujuan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara daerah, Provinsi dan Pusat sehingga tujuan Pembangunan berjenjang, tertib, teratur serta aman dapat terwujud.

Dokumen Rencana Strategis ini diharapkan dapat melanjutkan gerak langkah pembangunan di Kabupaten Takalar dan sekaligus diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan menanggulangi atau menuntaskan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat kabupaten terkait urusan pemerintahan yang berkenaan dengan layanan publik Dinas yaitu : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Takalar sesuai dengan amanat RPJPD 2025 – 2045, Mudah-mudahan Rencana Strategis Dinas PUTRPPK Kabupaten Takalar dapat memberikan informasi sesuai yang diharapkan oleh seluruh stakeholder tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun kedepan. Untuk itu masukan dan saran sangat diharapkan dari semua pihak untuk meningkatkan kinerja pada lembaga ini di masa mendatang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan di Kabupaten Takalar.

Takalar, 26 September 2025

Kepala Dinas,



Budiar Rosal Saleh, S.STP.,M.Adm.Pemb.

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19800520 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	v
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum.....	2
I.3 Maksud dan Tujuan	6
I.3.1 Maksud	6
I.3.1 Tujuan.....	6
I.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.....	 8
II.1 Gambaran Pelayanan Dinas PUTRPKP	8
II.1.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman .	8
II.1.1.1 Tugas	8
II.1.1.2 Fungsi	9
II.1.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum,Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	14
II.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum,Tata Ruang Perumahan Dan kawasan Permukiman.....	17
II.2.1 Sumber Daya Manusia	17
II.2.2 Asset/Modal	20
II.2.3 Kinerja Penyelenggaraan Dinas PUTRPKP Takalar	22
II.2.4 Indikator Sasaran Strategis (IKU).....	29
II.2.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	30
II.2.6 Capaian Kinerja Anggaran Dinas PUTRPKP	33
II.2.7 Kelompok Sasaran Layanan.....	38
II.2.8 Mitra DPUTRPKP Dalam Memberikan Layanan.....	38

II.2.9 Permasalahan dan Isu Isu Strategis Dinas PUTRPKP	39
II.2.9.1 Permasalahan Pelayanan Dinas PUTRPKP	39
II.2.9.2 Isu Strategis	41
BAB III TUJUAN,SASARAN,STRATEGI,DAN ARAH KEBIJAKAN.....	46
III.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	46
III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	49
III.2.1 Arah Kebijakan	50
III.2.2 Strategi	52
BAB IV PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN	59
IV.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran	59
IV.2 Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Induktif.....	63
IV.3 Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan.....	67
IV.3.1 Prioritas Pembangunan Nasional.....	67
IV.3.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.....	68
IV.3.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Takalar.....	70
IV.4 Indikator Kinerja Utama	74
IV.5 Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK),SPM (bagi OPD Pengampuh SPM),SDG/TPB	76
IV.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	76
IV.7 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	79
IV.8 Sustainable Development Goals (SDGs).....	81
BAB V PENUTUP	83
V.1 Pedoman Transisi.....	83
V.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	83

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PUTRPKP Kab. Takalar.....	23
Tabel II-2	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PUTRPKP	34
Tabel III-1	Keselarasan Sasaran Renstra Dinas PUTRPKP Tahun 2025-2029 Terhadap Tujuan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	47
Tabel III-2	Target Tujuan,Sasaran Dinas PUTRPKP Tahun 2025-2030	48
Tabel III-3	Pentahapan Renstra Dinas PUTRPKP Tahun 2026-2030.....	49
Tabel III-4	Arah Kebijakan Renstra Dinas PUTRPKP Tahun 2025-2029.....	51
Tabel III-5	Strategi Resntra Dinas PUTRPKP Tahun 2026-2030.....	53
Tabel IV-1	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas PUTRPKP.....	60
Tabel IV-2	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif Renstra Dinas PUTRPKP Tahun 2026-2030	64
Tabel IV-3	Keselarasan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PUTRPKP Tahun 2025 terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029.....	68
Tabel IV-4	Keselarasan Tujuan dan Sasaran Resntra Dinas PUTRPKP Tahun 2025 Terhadap Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029	69
Tabel IV-5	Keselarasan Tujuan Sasaran Resntras Dinas PUTRPKP Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029.....	71
Tabel IV-6	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	72
Tabel IV-7	Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas PUTRPKP Tahun 2025-2029.....	75
Tabel IV-8	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PUTRPKP	77
Tabel IV-9	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	80
Table IV-10	Sustainable Development Goals (SDGs)	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum,Tata Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar (Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 34 Tahun 2021).....	16
-------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUTRPPK) Kabupaten Takalar Tahun 2025- 2029 adalah suatu Dokumen Perencanaan strategis yang disusun setelah berakhirnya Dokumen Renstra Dinas Periode 2023-2026 untuk diharapkan dapat melanjutkan gerak langkah pembangunan di Kabupaten Takalar dan sekaligus diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan menanggulangi atau menuntaskan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat kabupaten terkait urusan pemerintahan yang berkenaan dengan layanan publik Dinas PUTRPPK

Rencana Strategis Dinas PUTRPPK Kabupaten Takalar 2025-2029 di susun sesuai dengan tugas dan fungsi urusan Pemerintahan Dinas PUTRPPK serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Takalar 2025-2029. Renstra Dinas PUTRPPK Kabupaten Takalar adalah bagian dari usaha pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Takalar yang tertuang dalam Dokumen RPJPD Kabupaten. Oleh karena pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan dan berintegrasi dari pusat ke daerah, berlandaskan kemampuan daerah dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan global, sedangkan kuantitas pembangunan memiliki kebutuhan sumber daya sehingga pencapaian hasil pembangunan selalu lebih mudah dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang telah diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 ini merupakan tindak lanjut dari berakhirnya Renstra Dinas PUTRPPK Kabupaten Takalar periode 2025-2029, dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah yang masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2030, oleh karena itu Renstra Dinas PUTRPPK Periode Tahun 2025-2029 merupakan turunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah transisi untuk jangka waktu 4(empat) tahun kedepan berdasarkan Instruksi yang dimaksud.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan Dokumen RPJMD. Renstra PUTRPPK disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah (PERKADA). Rencana Strategis ini memuat Tujuan, Sasaran Strategi yang di mana arah kebijakan tentunya

memperhatikan indikator Outcome(hasil) dari setiap program kerja, rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan, pendanaan berdasarkan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/pemutakhiran>, serta kinerja penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas PUTRPKP 2025-2029 merupakan acuan dalam Penyusunan Renja Dinas PUTRPKP untuk 4(Empat) Tahun ke depan.

I.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 sejumlah dasar hukum yang digunakan, yaitu:

- 1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 2). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 7). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7

- tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 8). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 9). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi tanah dan air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299 tambahan Lembaran Negara Nomor 5608);
 - 10). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 - 11). Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 12). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 - 13). Peraturan Pemerintah Nomor 18/2011 Tahun 2011 tentang Sungai (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31)
 - 14). Peraturan Pemerintah Nomor 50/2012 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309
 - 15). Peraturan Pemerintah Nomor 08/2013 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393
 - 16). Peraturan Pemerintah Nomor 79/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Air (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748
 - 17). Peraturan Pemerintah Nomor 122/2015 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802

- 18). Peraturan Pemerintah Nomor 54/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949)
- 19). Peraturan Pemerintah Nomor 64/2016 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004)
- 20). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 21). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 22). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)
- 23). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624)
- 24). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625)
- 25). Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626)

- 26). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 27). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 28). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air secara menyeluruh;
- 29). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 30). Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber daya Air;
- 31). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 32). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
- 33). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1792);
- 34). Peraturan Menteri dalam Negeri No. 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 35). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 sebagaimana telah diubah dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 36). Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 37). Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 2)
- 38). Peraturan Bupati Takalar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar;

- 39). Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 245 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang , Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029

I.3. Maksud Dan Tujuan

I.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar Tahun 2025 - 2029 disusun dengan maksud untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar 2025-2029, terutama yang terkait dengan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman.

I.3.2 Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029 sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar untuk jangka waktu Tahun 2025 - 2029.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas PUTRPKP adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas PUTRPKP

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki, Kinerja Pelayanan sampai saat ini, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPRPKP. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUTRPKP, Telaahan Dokumen RPD Kabupaten 2025-2029, Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, Telaahan Kementrian ATR-BPN, Telaahan Renstra Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Renstra Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan RTRW Kabupaten serta penentuan isu-isu strategis di Bidang ke-PU-an.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUTRPKP, Strategi dan Arah Kebijakan dalam menjabarkan sasaran Dinas PUTRPKP.

BAB IV Program Kegiatan, Sub. Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dalam tahun 2025-2029 pada Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar. Indikator Kinerja Dinas PUTRPKP Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, indikator kinerja Dinas PUTRPKP yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB V Penutup

berisi ringkasan singkat atau kesimpulan mengenai Dokumen Renstra Dinas PUTRPKP disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 4 (empat) tahun kedepan oleh Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UUMM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

II.1. Gambaran Pelayanan Dinas PUTRPKP

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Uumm, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

II.1.1.1. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Takalar melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar melalui Perda Pembentukan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah yang masih dipedomani sampai saat ini.

Untuk Kelompok tugas sub substansi dan nomenklatur sub koordinator untuk pelaksanaan tugas sub koordinator pada Dinas PUTRPKP maka sekarang kita memedomani Keputusan Bupati Takalar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. yaitu dalam melaksanakan Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar.
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.
3. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk Bupati.

Untuk lebih jelasnya mengenai uraian tugas dari masing-masing jabatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pemberian layanan teknis dan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pembinaan organisasi tata laksana, koordinasi dan pengendalian serta pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar.

3. Bidang Sumber Daya Air

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Sumber Daya Air.

4. Bidang Bina Marga

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan, pemograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamananan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

5. Bidang Cipta Karya

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan infrastruktur, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasanstrategis kabupaten.

6. Bidang Bina Konstruksi

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Bidang Tata Ruang

Mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan dan pembinaan penataan ruang dan pengendalian, penertiban dan pemanfaatan penataan ruang.

8. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Mempunyai tugas pokok melakukan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

II.1.1.2. Fungsi

Adapun Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas memiliki fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

6. Menyusun perencanaan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, bina konstruksi, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
7. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang sumberdaya air, bina marga, cipta karya, bina konstruksi, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
8. Melaksanakan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, ciptakarya, bina konstruksi, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
9. Melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, bina konstruksi, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumberdaya air, bina marga, cipta karya, bina konstruksi, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
11. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan Pekerjaan umum, Penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
12. Menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan dinas;
13. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris memiliki fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
3. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
4. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaankegiatan;
6. Mengoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;
7. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
9. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
10. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
11. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan,

- pemeliharaan dan penghapusan barang;
12. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
 13. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 14. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
 15. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
 16. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sumber Daya Air memiliki fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang sumber daya air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang sumber daya air untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menyusun konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
7. Menyusun pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
8. Melaksanakan program kegiatan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Marga memiliki fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Marga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Bina Marga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

naskah dinas;

5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melakukan koordinasi pemograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
7. Melaksanakan program kegiatan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Cipta Karya memiliki fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Cipta Karya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Cipta Karya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah;
7. Menyelenggarakan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah;
8. Melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah;
9. Menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah;
10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Konstruksi memiliki fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Konstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Bina Konstruksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

naskah dinas;

5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
7. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
8. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
9. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah daerah;
10. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah daerah;
11. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah daerah;
12. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat kabupaten dan Asosiasi Jasa Konstruksi di wilayah daerah;
13. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah daerah;
14. Melakukan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah daerah;
15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan oleh sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Ruang memiliki fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Tata Ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Tata Ruang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah;
7. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan penataan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis daerah;
8. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
9. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang pemerintahan daerah dan masyarakat;
10. Menyiapkan bahan kerjasama penataan ruang antar kabupaten dan pemfasilitasian kerjasama penataan ruang antar kabupaten;

11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman memiliki fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melakukan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
7. Melakukan pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
8. Melakukan pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
9. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

II.1.1.3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

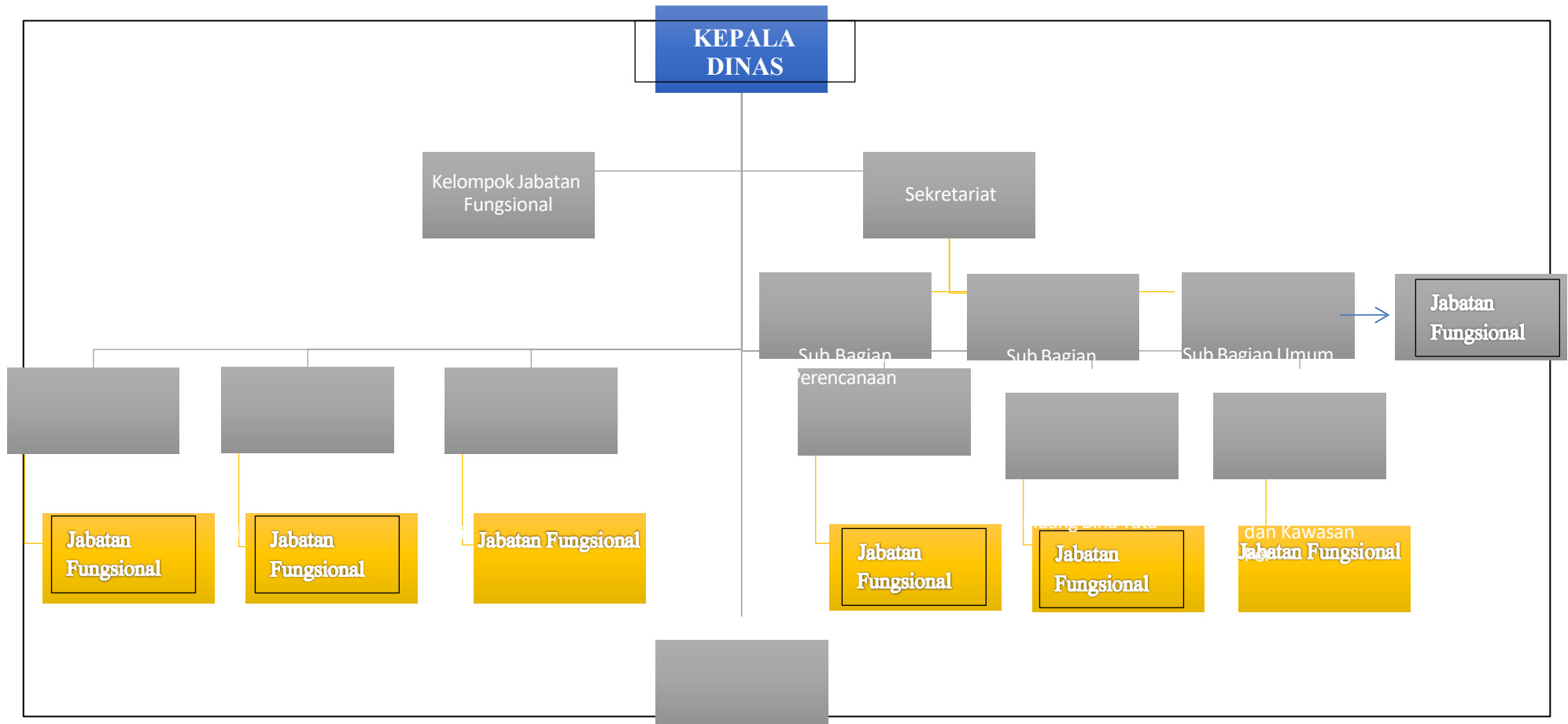
Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar, Struktur Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda
- 4. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
- 5. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda.
- 6. Bidang Bina Konstruksi
 - a. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda;
- 7. Bidang Tata Ruang
 - a. Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda;
- 8. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda;

Adapun struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada gambar II.1 berikut :

Gambar II.1
Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar
(Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 34 Tahun 2021)



II.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

II.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar, didukung oleh 66 orang Pegawai Negeri Sipil dan 171 Orang tenaga honorer dengan berbagai macam tingkat dan jenjang pendidikan.

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Tugas dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar sesuai Peraturan Bupati Takalar Nomor 31 Tahun 2022 tanggal 5 September 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar. Di mana Untuk Dinas PUTRPPK telah dilakukan Penyederhanaan Jabatan Struktural ke Fungsional yaitu dengan memangkas 12 Jabatan Eselon IV di 6(enam) Bidang menjadi Pejabat Fungsional tertentu secara serentak seluruh tatanan birokrasi pemerintahan. Kekuatan personil Aparatur Sipil Negara(ASN) di Dinas PUTRPPK: Jumlah Total ASN sebanyak 66 Orang; Laki-laki sebanyak 48 Orang; Perempuan sebanyak 18 Orang, dari jumlah tersebut terklasifikasi menurut kelompok jabatan; Pejabat Eselon II sebanyak 1 orang; Pejabat Eselon III sebanyak 5 Orang; Pejabat Eselon IV sebanyak 3 Orang; Pejabat Fungsional tertentu sebanyak 10 Orang; pejabat fungsional umum sebanyak 47 Orang(*Data per Tahun 2024)

Dengan Gambaran Kondisi diatas serta perhitungan berdasar analisis beban kerja untuk Dinasnya maka idealnya untuk Dinas PUTRPPK Kabupaten Takalar seharusnya mempunyai personil sebanyak 108 Orang Aparatur yang tersebar di 6 Bidang Teknis dan 1 Sekretariat Dinas yang masing masing mempunyai tugas jabatan sesuai analisis beban kerja aparatur itu sendiri sedangkan kondisi “real” sekarang yang terdapat di Dinas PUTRPPK sebanyak 66 Orang Personil ASN jadi masih membutuhkan tambahan Personil ASN sebanyak 42 Orang untuk menduduki tugas jabatan kosong sehingga tugas pemerintahan yang diemban oleh Dinas PUTRPPK dapat berjalan lebih optimal.

Untuk komposisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/ golongan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Komposisi Pegawai ASN Dinas PUTRPKP Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai (orang)
		L	P	
1.	Strata 2 (S2)	9	3	12
2.	Strata 1 (S1)	30	13	43
3.	Diploma III (D3)	2	0	2
4.	SLTA	7	2	9
	Jumlah	48	18	66

Sumber : Sub. Bag Umum & Kepeg Dinas PUPRPKP Tahun 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat bahwa umumnya ASN di Dinas PUTRPKP berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 43 orang, Diploma 3 sebanyak 2 orang, disusul tingkat SMA sebanyak 9 orang dan terdapat 12 (dua belas) orang juga berpendidikan master (S2). Melihat tingkat pendidikan tersebut, maka rencana capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPRPKP 2025-2029 semestinya akan optimis dapat dicapai karena sebanyak 66 (enam puluh enam) orang pegawai pada tingkatan pendidikan yang tinggi.

Selanjutnya mengenai komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas PUTRPKP berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Komposisi Pegawai ASN Dinas PUTRPKP Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin pada Tahun 2024

No.	Pangkat/ Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai (Orang)
		L	P	
1.	Pembina Utama Muda , IV/c	1	0	1
2	Pembina Tk. I, IV/b	1	0	1
3.	Pembina, IV/a	6	0	6
4.	Penata Tk. I, III/d	7	2	9
5.	Penata, III/c	14	8	22
6.	Penata Muda Tk. I, III/b	2	2	4
7.	Penata Muda, III/a	10	4	14
8.	Pengatur Tk. I, II/d	3	1	4
9.	Pengatur, II/c	2	0	2
10.	Pengatur Muda Tk. I/II.b	3	1	4
	Jumlah	48	18	66

Sumber : Sub. Bag Umum & Kepeg Dinas PUPRPKP Tahun 2024

Berdasarkan Tabel diatas, menunjukkan bahwa tingkat kepangkatan personil Dinas PUTRPKP mencerminkan juga kepada pengalaman dan masa kerja ASN, dengan jumlah personil sebanyak 66 orang ASN dengan pangkat tertinggi Pembina Utama Muda golongan IV.c, pembina Tk. I golongan IV.b atau pangkat terbanyak pada tingkat penata golongan III.c.

Untuk PPPK Paruh Waktu pada Dinas PUTRPKP per Tahun 2025 ini terdapat penempatan di berbagai bidang-bidang tugas yaitu Sekretariat Dinas : 35 Orang; Bidang Cipta Karya : 13 Orang; Bidang Bina Marga : 13 Orang; Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air : 46 Orang; Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman : 6 Orang; Bidang Tata Ruang : 8 Orang; Bidang Bina Konstruksi : 7 Orang; dengan berbagai macam jenis tugas pembantuan yang mereka kerjakan seperti Tenaga Administrasi Perkantoran dan tenaga lapangan(Penjaga Pintu air Irigasi / bendung; Pekarya Saluran; Operator Alat Berat; Sopir Dump Truk; Sopir Mobil Tinja; Operator IPLT; Tenaga Kebersihan kantor; tenaga Survey kawasan kumuh; bagian inventarisasiasset Dinas)

Berikut adalah Tabel hasil rekapan data PPPK Paruh Waktu pada Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar berdasarkan klasifikasi tempat penugasan, Jenjang Pendidikan, dan jenis kelamin Tahun 2025 dalam Tabel sebagai berikut:

Rekap Data PPPK paruh Waktu Dinas PUTRPKP terklasifikasi Berdasarkan Kualifikasi Bidang Penugasan, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Bidang Penugasan	Jenjang Pendidikan				Jenis Kelamin		Jumlah Personil (Orang)
		SD	SMP	SMU	S1	L	P	
1	Sekretariat Dinas	1	2	13	19	15	20	35
2	Cipta Karya		2	4	7	7	6	13
3	Bina Marga			6	7	8	5	13
4	Pengelolaan Sumber Daya Air			36	10	42	4	46

5	Perumahan & Kawasan Permukiman			2	4	3	3	6
6	Tata Ruang	1		5	2	3	5	8
7	Bina Konstruksi		1	2	4	2	5	7
Jumlah		2	5	68	53	80	48	128

Sumber : Sub. Bag Umum & Kepeg Dinas PUPRKP Tahun 2025

II.2. Asset/Modal

Adapun kondisi Asset atau modal yang mendukung pelaksanaan tugas aparatur sipil Negara dinas PUTRKP Kab. Takalar dapat dilihat dalam table berikut:

Kondisi Inventaris Asset Kantor Dinas PUTRKP

No	Klasifikasi Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Asphalt Sprayer	1	1	-	-
2.	Track Loader + Attachment	1	1	-	-
3.	Mesin Bor Lainnya	1	-	1	-
4	Mesin Pemotong Aspal (Dragin)	1	-	-	1
5	Water Pas	1	1	-	-
6	Rol Meter	2	1	1	
7	Global Positroning System	2	2	-	-
8	Paving Blok	66 (Ruas)	66	-	-
9	Saluran Drainase	489 (Ruas)	489	-	-
10	Bangunan Air Tawar lain	1	1	-	-
11	Sumur dengan Pompa	31	31	-	-
12	Waduk Penyimpanan airbaku	3	3	-	-
13	Bangunan Waduk airbersih	1	1	-	-
14	Bangunan Pengambilan Dari Sumber air	1	1	-	-
15	Saluran Pembuang air	1	1	-	-

	cucian instalasi				
16	Bangunan Pembuang air bersih/air baku lainnya	1	1	-	-
17	Bangunan penampung air baku	26	26	-	-
18	Bangunan pembuang airkotor lainnya	22	22	-	-
19	Bangunan pompa airhujan	1	1	-	-
20	System pengolahan air sederhana (SIPAS)	15	15	-	-
21	Penampung Air Hujan	1	1	-	-
22	Sumur gali	1	1	-	-
23	Instalasi air bersih/airbaku lainnya	43	43	-	-
24	Instalasi air buangan pertanian kapasitas Sedang	1	1	-	-
25	Jaringan PembawaKapasitas sedang	8	8	-	-
26	Saluran tersier pembuang	72	72	-	-
27	Bangunan Bendung dengan pompa	1	1	-	-
28	Bangunan gorong-gorong	1	1	-	-
29	Bangunan gorong-gorong (Bangunan pelengkap pengembangan rawa)	2	2	-	-
30	Bangunan Mandi Cuci Kakus	1	1	-	-
31	Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya	85	85	-	-
32	Bangunan Pembawa Irigasi Lainnya	4	4	-	-
33	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai	3	3	-	-
34	Bangunan Pembuang Irigasi Lainnya	60	60	-	-
35	Jaringan Distribusi Tegangan diatas 20 KVA	3	3	-	-
36	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	19	19	-	-
37	Bangunan Pembuang Pasang Surut Lainnya	1	1	-	-
38	Bangunan Pengaman Irigasi Lainnya	3	3	-	-
39	Bangunan Pengambilan Bebas	1	1	-	-
40	Bangunan Pengambilan dari Sumber Air	1	1	-	-

Sumber : Sub. Bag Umum & Kepeg Dinas PUPRKP Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, hampir seluruh aset atau modal yang dikelola oleh Dinas PUTRKP ber kondisi baik dan dapat dipergunakan, hanya terdapat beberapa aset yang dalam kondisi rusak ringan. Aset laptop dalam kondisi baik sebanyak 23 buah dan rusak ringan sebanyak 19 buah. Sedangkan untuk sepeda motor, terdapat 35 unit

yang masih baik, rusak ringan 9 unit. Kendaraan bernotor ini beroperasi sehari-hari untuk menunjang pelaksanaan tugas personil Dinas PUTRPKP kabupatenTakalar.

II.2.3. Kinerja Penyelenggaraan Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar

Kinerja penyelenggaraan dinas merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah sebagai penjabaran visi, misi, maupun strategi yang yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan

Untuk menganalisa kinerja penyelenggaraan pelayanan, harus diukur melalui target yang sudah ditetapkan per periode Renstra Dinas, sehingga dapat dilakukan evaluasi di setiap tahunnya atas dasar hasil pengukuran tersebut. Berikut adalah Tabel II.1. yang menggambarkan Pencapaian Kinerja Dinas PUTRPKP 2020-2024 :

Tabel II.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) periode Renstra 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke			Realisasi Capaian Tahun Ke			Rasio Capaian pada Tahun Ke-		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	64,54%	63,90%	65,77%	54,74%	45,57%	62,77%	84,82%	71,31%	95,43%
2	Persentase irigasi desa dalam kondisi baik	75,00%	77,00%	79,00%	74,04%	74,05%	74,33%	98,72%	96,17%	94,09%
3	Persentase Rumah tangga ber Sanitasi	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	30,00	31,00	32,00	34,00	31,58	32,59	113,33%	101,88%	101,86%
5	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kabupaten	20,00	20,00	20,00	0,14	0,03	0,03	0,70%	0,15%	0,15%
6	Persentase penurunan jumlah kawasan kumuh	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
7	Cakupan rumah layak huni	0,00%	50,00%	100,00%	89,89%	91,48%	91,48%	0,00%	182,96%	91,48%
8	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	91,00%	91,48%	91,70%	0,83%	3,93%	3,93%	0,91%	4,30%	4,29%

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Periode Renstra 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke		Realisasi Capaian Tahun Ke		Rasio Capaian pada Tahun Ke-	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum	100,00%	100,00%	97,58%	98,30%	97,58%	98,30%
2	Persentase Peningkatan kondisi kemantapan jalan kabupaten	70,20%	71,20%	61,71%	63,46%	87,90%	89,13%
3	Persentase Luas Persawahan yang terlayani Irigasi tersier Kewenangan Kabupaten	83,00%	85,00%	74,08%	74,22%	89,25%	87,32%
4	Rasio kepatuhan PBG kab/kota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	40,00%	45,00%	1,13%	0,00%	2,83%	0,00%
6	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan Perumahan	100,00%	100,00%	152,70%	0,03%	152,70%	0,03%
8	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100,00%	100,00%	26,88%	2,11%	26,88%	2,11%
9	Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten	92,17%	92,86%	92,12%	92,19%	99,95%	99,28%
10	Nilai SAKIP Dinas PUTRPKP	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	100,00%	100,00%

II.2.4. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi capaian kinerja pada sasaran strategis tahun 2023 dan tahun 2024 (Periode Renstra 2017- 2022) dan (Periode Renstra 2023-2026) sebagaimana pada tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Untuk sasaran 1.1, dengan indikator kinerja Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum, diperoleh realisasi kinerja 100 % dari target 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 100%. Sedangkan faktor penghambat/Pendukung adalah Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini tercapai dengan kerjasama yang baik antara pihak eksekutif (Dinas PUTRPPK) dengan pihak terkait seperti pihak legislatif dan komponen masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang turut serta dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu juga didukung dengan adanya penganggaran pada program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang termasuk dalam program pendukung SPM
- b. Untuk sasaran 1.2, dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan kondisi kemantapan jalan kabupaten, diperoleh realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 63,46% dari target 71,20%, dengan rasio capaian sebesar 89,13%. Berdasarkan data dari Bidang Bina Marga, panjang jalan dengan kondisi mantap (baik dan sedang) adalah sepanjang 478,79 km dari total panjang jalan 754,49 km. Faktor Penghambat sehingga realisasi tidak memenuhi target, karena minimnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dicairkannya pengajuan anggaran sampai akhir tahun, sehingga banyak kegiatan fisik yang menjadi utang di tahun berikutnya. Kondisi infrastruktur pendukung jalan seperti drainase yang tidak berfungsi optimal sehingga seringkali menimbulkan genangan air di badan jalan yang juga berpotensi menimbulkan kerusakan. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara pihak eksekutif (Dinas PUTRPPK) dengan pihak terkait seperti pihak legislatif dan komponen masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang turut serta dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, peningkatan kualitas jalan juga harus didukung dengan penganggaran yang cukup
- c. Untuk sasaran 1.3, dengan indikator kinerja Persentase Luas Persawahan yang terlayani Irigasi tersier Kewenangan Kabupaten, diperoleh realisasi kinerja 74,22% dari target 85,00%, sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 87,32%. Berdasarkan data dari Bidang Sumber Daya Air, Luas sawah yang dilayani jaringan irigasi 2.859 ha sedangkan luas sawah daerah irigasi di kabupaten Takalar 3.852 ha , Faktor Penghambat sehingga realisasi tidak memenuhi target, karena minimnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dicairkannya pengajuan anggaran sampai akhir tahun, sehingga banyak kegiatan fisik yang menjadi utang ditahun berikutnya.

- d. Untuk sasaran 1.4, dengan indikator kinerja Rasio kepatuhan PBG kab/kota, diperoleh realisasi kinerja 100% dari target 100%, sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 100%. Tercapainya realisasi kinerja sesuai target, didukung oleh semua stakeholder, dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan pengurusan PBG. Berdasarkan data dari bidang Tata Ruang tahun 2024 Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya 152 bangunan sedangkan Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku 152 SK PBG.

- e. Untuk sasaran 1.5, dengan indikator kinerja Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi, diperoleh realisasi kinerja sampai tahun 2024 26,73% , Berdasarkan data dari Bidang Bina Konstruksi Jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat 243 orang Jumlah kebutuhan tenaga konstruksi 909 orang di wilayah kabupaten, untuk capaian kinerja Rendah/Tidak adanya realisasi kinerja dalam pencapaian sasaran ini, disebabkan tidak diberikannya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi. Hal ini diharapkan menjadi perhatian khusus, agar memenuhi kebutuhan penganggaran, terutama untuk kegiatan yang masuk dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- f. Untuk sasaran 2.1, dengan indikator kinerja Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan Perumahan, diperoleh realisasi kinerja 100 % dari target 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 100%. Hal ini didukung oleh pelaksanaan dan ketersediaan anggaran untuk pemenuhan SPM yang memadai. Berdasarkan data dari Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Rehabilitasi rumah korban bencana 3 unit sedangkan target Rehabilitasi rumah korban bencana 3 unit.
- g. Untuk sasaran 2.2, dengan indikator kinerja Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten, diperoleh realisasi kinerja 92,19 % dari target 92,86% sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 99,28%. Hal ini didukung oleh pelaksanaan dan ketersediaan anggaran yang memadai. Berdasarkan data dari Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Takalar 5.650 unit, sedangkan jumlah unit rumah di Kabupaten Takalar 72.297 unit.
- h. Untuk sasaran 3.1, dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas PUTRPKP, diperoleh realisasi kinerja 70% dari target 70% sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 100%. Hal ini didukung oleh pelaksanaan dan ketersediaan anggaran yang memadai.

3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	40,00%	42,00%	45,00%	47,00%	50,00%	22,96%	22,96%	22,96%	36,11%	36,11%	57,40%	54,67%	51,02%	76,83%	72,22%
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	25,00%	30,00%	35,00%	45,00%	50,00%	12,29%	12,89%	21,80%	23,22%	23,22%	49,16%	42,97%	62,29%	51,60%	46,44%
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	75,00%	77,00%	79,00%	83,00%	85,00%	74,04%	74,05%	74,08%	74,08%	74,22%	98,72%	96,17%	93,77%	89,25%	87,32%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	50,00%	70,00%	80,00%	90,00%	98,12%	81,74%	96,79%	97,85%	97,20%	98,13%	163,48%	138,27%	122,31%	108,00%	100,01%
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%	90,45%	91,40%	91,42%	97,96%	98,51%	100,50%	100,44%	99,37%	105,33%	104,80%

6	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Tingkat Kemantapan Jalan	64,54%	63,90%	65,77%	70,20%	71,20%	64,51%	63,90%	62,77%	61,71%	63,46%	99,95%	100,00%	95,44%	87,91%	89,13%
8	Rasio tenaga operator / teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	37,00%	38,00%	39,00%	40,00%	45,00%	4,60%	1,06%	2,11%	1,13%	0,00%	12,43%	2,79%	5,41%	2,83%	0,00%
9	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,878%	2,11%	0,00%	0,00%	0,00%	26,88%	2,11%
11	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,00%
13	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,00%	8,52%	0,00%	7,83%	7,14%	8,52%	8,52%	8,50%	7,81%	7,81%	0,00%	0,00%	0,00%	99,74%	109,38%
14	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,00%	0,00%	0,00%	16,95%	33,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Gambaran Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) kewenangan Dinas PU:

1. **Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota**, target tahun 2024 sebesar 50% dan terealisasi sebesar 36,11% atau capaian sebesar 72,22%, indikator ini tidak tercapai targetnya, faktor penghambat adalah Penyelesaian permasalahan harus dilaksanakan di daerah hulu, yang membutuhkan biaya yang besar
2. **Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota**. Target Tahun 2024 sebesar 50% dan terealisasi sebesar 23,22% atau capaian sebesar 46,44%, indikator ini tidak mencapai targetnya, factor penghambatnya adalah karena alokasi anggaran untuk indikator ini sangat kecil dibandingkan dengan wilayah terdampak, tidak bisa mengandalkan sumber dana dari APBD Kabupaten, perlu bantuan alokasi anggaran dari Provinsi maupun pusat.
3. **Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi**, Target Tahun 2024 sebesar 85% dan terealisasi sebesar 74,22% atau capaian 87,32%, indikator ini tidak mencapai targetnya faktor penghambat adalah alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) memprioritaskan pada Rehabilitasi jaringan Irigasi, alokasi DAK masih lebih besar dibanding alokasi sumber dana APBD.

Untuk Pengelolaan Sumber daya Air, Indikator “*Persentase luas Persawahan yang terlayani Irigasi tersier kewenangan Kabupaten*” dengan capaian 74,22% dari target sebesar 85%; Capaian 74,22% atau luas cakupan yang dilayani sebesar 18.400 M didukung oleh 11 (sebelas) D.I ; menurut data yang terbaca di e-paksi ada 11(sebelas) Daerah Irigasi beserta rincian luasan Cakupannya untuk saluran Primer dan Sekunder yaitu:

- DI. Bontorea dengan Luas Cakupan 1.290 M
- DI. Ngai-ngai dengan Luas Cakupan 850 M
- DI. Barugaya dengan Luas Cakupan 1.250 M
- DI. Batang lappo dengan Luas Cakupan 820 M
- DI. Je’ne Maeja dengan Luas Cakupan 3.090 M
- DI. Kampong Bugisi dengan Luas Cakupan 1.260 M
- DI. Katonokang dengan Luas Cakupan 1.020 M
- DI. Lembang loe dengan Luas Cakupan 1.070 M
- DI. Je’ne Tallasa dengan Luas Cakupan 2.790 M
- DI. Balang Tanaya dengan Luas Cakupan 3.820 M
- DI. Palilangi dengan Luas Cakupan 1.140 M

Data dukung lainnya, Daerah irigasi Kewenangan Kabupaten saat ini totalnya 29.270 M yang terkoneksi dengan saluran Primer dan Sekunder, dari 29.270 M itu melayani Area Pertanian di Kab. Takalar seluas 2.108 Ha berbanding dengan Total area Irigasi Kabupaten seluas 2.852 Ha

atau pencapaiannya sebesar 73,91%. Pengelolaan Irigasi untuk pertanian rakyat Takalar butuh sentuhan pendanaan yang optimal untuk memajukan sektor pertanian di kabupaten di masa masa yang akan datang, semoga sector irigasi bisa menjadi salah satu prioritas pendanaan untuk tahun tahun berikutnya mengingat Irigasi masuk juga dalam pencapaian Indikator infrastruktur Kabupaten.

4. **Persentase jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**, Target Tahun 2024 sebesar 98,12% dan terealisasi 98,13% atau capaian sebesar 100,01% faktor pendukung keberhasilan pencapaian target indicator ini adalah adanya dukungan dari beberapa stakeholder yang berkecimpung di bidang air minum Kabupaten. Akses Rumah Tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan sebesar 37,89%. Terdapat 46 Wilayah Perkotaan di Kabupaten Takalar dari 110 Desa/Kelurahan. Capaian ini masih jauh dari target Nasional yakni 70%, salah satu penyebabnya adalah kemampuan iddel capacity yang dimiliki oleh PDAM sudah tidak tersedia. Nilai persentase ini akan meningkat Ketika SPAM Regional Mamminasata sudah berfungsi dengan target 3.000 sambungan rumah sampai tahun 2027.
5. **Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic**, Target Tahun 2024 sebesar 94% dan terealisasi sebesar 98,51% atau capaian Indikator sebesar 104,80%, indicator ini melampaui dari targetnya, factor pendorong capaiain indicator adalah selain adanya Swadaya dari masyarakat, ada juga dukungan seluruh stakeholder
6. **Rasio kepatuhan IMB kab/ kota**, Target Tahun 2024 sebesar 100%, realisasi sebesar 100% atau capaian indikator juga sebesar 100%, faktor pendukung/penghambat capaian indikator ini adalah minimnya alokasi anggaran untuk sosialisasi di masyarakat;
sistem yang digunakan dalam pengukuran kinerja ini terbagi menjadi 2 Bagian, yaitu Numerator dan Denominator sebagai pembaginya, Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota mempunyai satuan Persen(%), dengan rumus perhitungan : Persentase dari "Jumlah Gedung sesuai peruntukannya PBG Tahun berjalan" berbanding "Jumlah PBG Tahun berjalan", dengan Nilai Rasio 100% menunjukkan Tingkat kepatuhan masyarakat kab. Takalar untuk pemanfaatan Bangunan Gedung terhadap PBG, Tercapainya realisasi kinerja sesuai target, didukung oleh semua stakeholder, dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan pengurusan Sebagian besar Bangunan telah dimanfaatkan sesuai Izin yang diberikan dan Bangunan tersebut perlu dilakukan Pembinaan dan Pengawasan lebih lanjut.
7. **Tingkat Kemantapan Jalan**, Target Tahun 2024 sebesar 71,20% dan terealisasi sebesar 63,46% atau capaian sebesar 89,13%, indicator ini tidak mencapai target yang ditetapkan, factor penghambat adalah minimnya alokasi anggaran untuk indicator ini dari APBD sedangkan DAK Jalan juga tidak kucur di tahun berkenaan.

Untuk Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, *Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten* dari target kinerja sebesar 71,20% dan terealisasi sebesar 63,46%, dimana Panjang Jalan Kabupaten sebesar

754,49 KM yang terdiri dari 348 ruas jalan. Kondisi Jalan Baik sebesar 335,13 KM atau 44,42%; Kondisi Jalan sedang sebesar 94,65 KM atau 12,54%; Kondisi Jalan rusak ringan sebesar 95,54 KM atau 12,66%; Kondisi Jalan Rusak Berat sebesar 229,17 KM atau 30,37%; Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2025 ini terukur *cenderung turun* dengan berbagai sebab antara lain yang sudah dirasakan saat ini adalah Pendanaan dari Dana Alokasi Khusus untuk Jalan di tahun ini mengalami refocusing Anggaran dari pusat, hal ini berarti Pembangunan jalan dan Perbaikan Jalan dari Dana DAK di Tahun 2025 Nihil, kondisi yang sama juga dengan sumber dana APBD/DAU Kabupaten karena adanya efisiensi Anggaran

8. **Rasio tenaga Operator/Teknisi /Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**, Target tahun 2024 sebesar 45% dan tidak ada realisasi kinerja untuk indicator ini atau 0%, factor penghambatnya adalah tidak diberikan alokasi anggaran yang diberikan oleh TAPD Kabupaten saat itu,
9. **Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi**, Target Tahun 2024 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau capaiannya 100%, factor pendukung adalah dalam kabupaten Takalar dari hasil pendataan yang dilakukan selama tahun berkenaan adalah tidak adanya kecelakaan kerja yang terjadi sehingga pencapaian indicator kinerja ini bisa maksimal.
10. **Penyediaan dan rehabilitasi Rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota**, indicator ini juga adalah indicator standar Pelayanan Minimal, sehingga penetapan target sebesar 100% dan yang terealisasi hanya 2,11%, factor penghambatnya adalah minimnya anggaran yang diberikan Pemerintah Kabupaten untuk indicator ini sehingga layanan dasar perumahan di kabupaten tidak berjalan semestinya.
11. **Fasilitas penyediaan Rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kab/kota**, target Tahun 2024 sebesar 0% dan terealisasi sebesar 0% juga, artinya dalam skala Kabupaten tidak terfasilitasi Penyediaan rumah yang dimaksud disebabkan karena dalam kabupaten tidak terjadi relokasi rumah akibat program Pemerintah, Pemerintah di Tahun 2024 itu tidak melakukan relokasi rumah warga
12. **Persentase Kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani**, target Tahun 2024 sebesar 5% dan terealisasi sebesar 1,05% atau capaian sebesar 21%, Indikator tidak mencapai target yang ditetapkan dengan factor penghambatnya Anggaran untuk indicator ini tidak memadai(minim).
13. **Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)**, Target Tahun 2024 sebesar 7,14% dan terealisasi sebesar 7,81% atau capaian sebesar 109,38%, indicator ini mencapai target dengan factor pertimbangannya adalah bahwa Data Rumah keseluruhan di Kabupaten senilai 72.297 Unit adalah kondisi pendataan Rumah di Tahun 2019, dengan kata lain bahwa kondisi rumah yang diukur sudah tidak representative karena kemungkinan besar kondisi rumah di Tahun 2024 ini sudah jauh dari perhitungan 5 tahun yang lalu, jadi disimpulkan bahwa indicator pengukurannya sudah tidak bisa mewakili keadaan rumah saat ini.

Jumlah Unit Rumah di Kabupaten sebesar 72.297 Unit Rumah sedangkan Data Tahun 2025 per TW I, Rumah tidak layak huni sebesar 5.330 Unit Rumah dan Rumah layak huni sebesar 66.967 Unit rumah atau pencapaian sebesar 92,627% di tingkat Kabupaten atau terjadi peningkatan persentase rumah layak huni sebesar 0,437 %; dengan berharap dukungan pendanaan yang layak semoga Dinas PUTRPPK dapat melampaui target kinerja Tahun 2025 sebesar 96% untuk Indikator dimaksud.

14. **Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum),** Target Tahun 2024 sebesar 33,91% dan terealisasi sebesar 0% atau tidak diukur, karena sebab tidak adanya anggaran yang disediakan untuk kegiatan pendataan PSU Perumahan di Tahun 2024.

4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	81,74%	96,79%	97,85%	97,20%	98,13%	81,74%	96,79%	97,85%	97,20%	98,13%
2	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,45%	91,40%	91,42%	97,96%	98,47%	90,45%	91,40%	91,42%	97,96%	98,47%
3	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,88%	2,11%	0,00%	0,00%	0,00%	26,88%	2,11%
4	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

II.2.5. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari dan Penyediaan Pelayanan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, seluruh indikator SPM yang menjadi kewenangan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar untuk pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

- 1). Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja untuk indikator ini pada awal RPJMD adalah sebesar 88,01, sementara target kinerja tahunan yang harus dicapai selama periode 2018 – 2020 adalah 100%. Data realisasi capaian kinerja yang diraih selama periode 2018 – 2020 hanya diperoleh untuk tahun 2020 yaitu sebesar 24% atau jauh dibawah realisasi capaian pada awal RPJMD dan tidak dapat memenuhi target tahunan yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar untuk penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari masih rendah.
- 2). Penyediaan Pelayanan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Capaian kinerja indikator ini pada awal RPJMD adalah 60%, sementara target tahunan yang direncanakan untuk periode tahun 2018 – 2020 adalah masing masing sebesar 100%. Data capaian kinerja indikator ini hanya diperoleh untuk tahun 2020 yaitu sebesar 0,6% yang diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) sementara data untuk tahun 2018 dan 2019 tidak tersedia. Jika disandingkan antara capaian kinerja pada awal RPJMD dengan capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2020 maka terdapat perbedaan yang sangat signifikan yang cenderung bermakna sebagai penurunan kualitas layanan.

Sedangkan untuk Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi

program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan data capaian kinerja yang dirangkum dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Takalar Tahun 2020, ditemukan bahwa semua indikator SPM untuk pelayanan dasar perumahan rakyat dan Kawasan perumahan belum ada yang memenuhi target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Takalar selama periode 2018 – 2020 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Standar jumlah berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sementara kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni. Tidak realisasi kinerja untuk indikator ini, penyebabnya adalah karena tidak ada Pagu anggaran yang disediakan untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang dilaksanakan terhadap korban bencana. Dari Data hasil rekapan Kami di Dinas PUPRPKP Kabupaten Takalar Tahun 2023 terdapat 18 Unit Rumah Korban Bencana yang perlu diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal Rehabilitasi Rumah korban bencana di kabupaten dengan rincian dan jenis bencana sebagai berikut :
 - a. Lokasi Kalebentang, Galesong Selatan terdapat 1 unit Rumah KorbanBencana Kebakaran
 - b. Lokasi Sawakong, Galesong Selatan terdapat 1 Unit Rumah KorbanBencana Kebakaran
 - c. Lokasi Tarowang, Galesong Selatan terdapat 6 unit Rumah Korban Bencana Angin putting beliung
 - d. Lokasi Popo, Galesong Selatan terdapat 4 unit Rumah Korban BencanaAbrasi
 - e. Lokasi Canrego, Polongbangkeng Selatan terdapat 1 unit Rumah Korban Bencana Kebakaran
 - f. Lokasi Rajaya, Polongbangkeng Selatan terdapat 3 unit Rumah KorbanBencana Angin puting beliung
 - g. Lokasi Bulukunyi, Polongbangkeng Selatan terdapat 1 unit Rumah Korban Bencana Kebakaran
 - h. Lokasi Bontokadatto, Polongbangkeng Selatan terdapat 1 unit Rumah Korban Bencana Angin puting beliung

Hal tersebut di atas perlu mendapat perhatian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) karena Indikator ini adalah Indikator layanan Dasar untuk Bidang urusan Pemerintahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Tidak ditemukan data untuk indikator ini selama periode 2023 - 2024 di Kabupaten Takalar karena selama periode tersebut tidak pernah dilakukan relokasi rumah yang programnya diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.

5. Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%	81,74%	96,79%	97,85%	97,20%	98,13%	90,82%	106,36%	106,36%	104,52%	104,39%
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	50,00%	70,00%	80,00%	90,00%	98,12%	90,45%	91,40%	91,42%	97,96%	98,47%	180,90%	130,57%	114,28%	108,84%	100,36%
3	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	95,00%
4	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	91,00%	91,48%	91,70%	92,17%	92,86%	91,48%	91,48%	91,50%	92,12%	92,19%	100,53%	100,00%	99,78%	99,95%	99,28%

Gambaran Pencapaian Indikator SDGs Dinas PUTRPKP

1. **Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.** Target Tahun 2024 sebesar 94% dan terealisasi sebesar 98,13% atau capaian sebesar 104,39%, 2 Macam Sistem Penyediaan Air Minum yang adakan melalui Jaringan Perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan untuk bisa menyentuh permukiman warga yang membutuhkan layanan, Indikator tersebut mencapai target dengan dukungan pendanaan serta dukungan dari beberapa stakerholder bidang air minum;
2. **Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.** Target kinerja indicator ini di Tahun 2024 sebesar 98,12% dan terealisasi sebesar 98,47% atau dengan tingkat capaian senilai 100,36%, indikator ini mencapai target dengan dukungan pendanaan dari APBD maupun sumber Dana DAK Bidang Sanitasi di Tahun berkenaan;
3. **Proporsi Rumah Tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.** Target tahun 2024 sebesar 2% dan terealisasi sebesar 1,90% atau capaian indicator sebesar 95%, Indikator ini tidak mencapai Target dengan factor penghambat adalah Dukungan dana untuk sanitasi aman belum maksimal dibuktikan dengan belum berjalan efektifnya pengelolaan Mobil Tinja di kabupaten Takalar, solusi yang bisa meningkatkan kinerja capaian indicator ini, dengan harapan setelah terbentuknya UPTD. Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) di Kabupaten Takalar akan semakin memperkuat kinerja di Bidang Sanitasi kategori “Aman”.

Target Nasional Sanitasi aman adalah 15%. Kabupaten Takalar, capaian sanitasi amannya sampai bulan November Tahun 2025 adalah 1,41%. Pencapaian ini masih jauh dari target daerah yakni 6%. Ini diakibatkan, karena baik regulasi, Retribusi, dan Kelembagaan baru terbentuk dan ada di tahun 2024. Regulasinya yakni Perda tentang pengelolaan air limbah domestik Nomor 05 Tahun 2024, Perda tentang pajak dan retribusi daerah yang memuat tentang tarif jasa penyedotan lumpur tinja dan terkait kelembagaan, telah terpisah Operator dan Regulator Pengelola air limbah domestik berdasarkan peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas PUTRPKP kab. Takalar.

Layanan UPT PALD di Kabupaten Takalar masih bersifat On Call, artinya bahwa jasa layanan masih tergantung pada kebutuhan masyarakat. Adapun strategi yang harus dilakukan dalam mencapai target sanitasi aman adalah sbb:

1. Sosialisasi di tiap kecamatan

2. Mewajibkan seluruh rumah ASN untuk dilakukan penyedotan secara berkala (3-5 tahun sekali)
3. Melakukan program LLTT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal)
4. **Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.** Target Tahun 2024 sebesar 92,86% dan terealisasi sebesar 92,19% atau capaian indicator sebesar 99,28%

II.2.6. Capaian Kinerja Anggaran Dinas PUPRPKP Kabupaten Takalar

Adapun target dan pencapaian kinerja tahun 2020-2024 dan rincian anggaran serta realisasi pendanaan pelayanan OPD Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar dapat dilihat pada Tabel II.2 sebagai berikut :

Tabel II.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dna Kawasan Permukiman
Kabupaten Takalar

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Rata-Rata	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.833.759.072,43	4.025.447.026,05	4.226.719.377,33	10.961.223.948,00	10.270.111.262,00	9.138.450.934,00	8.307.624.579,00	9.294.272.457,00	7.142.362.703,00	7.147.899.170,00	238,37%	206,38%	219,89%	65,16%	69,60%	66,97%	19,55%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	73.625.000.000,00	75.937.500.000,00	77.486.135.000,00	12.754.784.000,00	12.754.784.000,00	3.063.599.029,00	4.505.169.796,00	18.979.161.625,00	11.942.333.889,00	4.762.087.738,00	4,16%	5,93%	24,49%	93,63%	37,34%	4,33%	38,86%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	-	6.279.375.000,00	5.804.375.000,00	3.347.266.500,00	7.800.802.500,00	7.137.104.862,00	832.521.000,00	843.270.450,00	0,00%	0,00%	0,00%	13,26%	14,53%	0,00%	6,30%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	140.000.000,00	50.000.000,00	130.000.000,00	4.107.866.000,00	4.307.866.000,00	33.159.000,00	6.133.558.200,00	4.824.894.900,00	11.880.000,00		23,69%	12267,12%	3711,46%	0,29%	0,00%	769,26%	0,00%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	27.793.719.000,00	36.090.000.000,00	31.400.080.000,00	1.900.000.000,00	700.000.000,00	122.203.500,00	2.329.650.100,00	3.636.331.281,00	3.969.575.354,00	1.404.328.760,00	0,44%	6,46%	11,58%	208,93%	200,62%	0,63%	287,29%
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				1.600.000.000,00	1.500.000.000,00						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	4.670.000.000,00	4.415.000.000,00	3.350.125.000,00	600.000.000,00	500.000.000,00			26.918.900,00	4.993.500,00		0,00%	0,00%	0,80%	0,83%	0,00%	2,68%	0,00%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	500.000.000,00	750.000.000,00	1.000.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	202.451.500,00	531.356.000,00	331.404.500,00	100.989.000,00	218.577.000,00	40,49%	70,85%	33,14%	16,83%	36,43%	30,00%	26,99%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.980.000.000,00	3.200.000.000,00	1.600.000.000,00	1.250.000.000,00	700.000.000,00	5.627.061.922,94	10.632.924.826,10	20.627.328.355,00	11.372.030.340,00	22.555.452.945,00	188,83%	332,28%	1289,21%	909,76%	3222,21%	5,87%	100,21%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	119.595.000.000,00	121.380.000.000,00	124.950.000.000,00	20.091.967.000,00	19.613.079.686,00	3.050.640.822,00	32.010.094.125,00	124.526.393.848,00	59.411.989.032,00	35.397.881.459,00	2,55%	26,37%	99,66%	295,70%	180,48%	4,10%	290,09%
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	464.000.000,00	464.000.000,00	543.431.643,00	311.206.550,00	528.656.614,00	280.132.837,00	22.604.700,00	43,47%	24,90%	42,29%	60,37%	4,87%	9,28%	1,04%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.025.000.000,00	500.000.000,00	232.164.500,00	1.285.234.450,00	1.576.101.100,00	445.053.050,00	365.523.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	43,42%	73,10%	0,00%	39,36%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	10.650.000.000,00	33.000.000.000	22.650.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	551.702.199,00	143.217.700,00	51.369.300,00	152.280.640,00	726.595.700,00	5,18%	0,43%	0,23%	507,60%	2421,99%	0,07%	32,93%
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00	191.415.100,00	222.506.800,00	901.373.037,00	177.790.000,00	47.757.793,00	7,66%	8,90%	36,05%	34,19%	9,18%	5,20%	6,24%
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				50.000.000,00	60.000.000,00						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				500.000.000,00	500.000.000,00		98.454.450,00				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.050.000.000,00	2.550.000.000,00	2.575.000.000,00	1.200.000.000,00	500.000.000,00	52.592.250,00	120.150.150,00	6.435.175,00	3.048.990.700,00	2.663.685.750,00	2,57%	4,71%	0,25%	254,08%	532,74%	6,10%	1266,20%

Sumber data : 1. Target - Rencana Strategis (Renstra)

1. Realisasi - Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Laporan Realisasi Anggaran

Dari Data diatas, terdapat 17(tujuh belas) Program yang direncanakan penganggarannya di periode 2020-2024 namun terdapat 4(empat) Program dengan kondisi “Inkonsisten” Penganggarannya, yaitu antara Perencanaan Anggaran dan Realisasinya, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Program tersebut belum menjadi prioritas pembangunan kepala daerah saat itu, Program yang dimaksud adalah : Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan Regional; Program Pengembangan Permukiman; Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Program Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh.

Dari tabel di atas, Periode 2020-2024 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan realisasi anggaran yang signifikan di Tahun 2022 pada Program Penyelenggaraan Jalan dengan nilai Realisasi sebesar Rp 124.526.393.848,- hal ini sejalan dengan Program Prioritas Kepala Daerah waktu itu dan didukung pula adanya alokasi anggaran dari sumber dana PEN di Program tersebut.

Realisasi anggaran APBN/APBD yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp76.155.664.965,- (92,05 %) dari total pagu anggaran Rp82.734.885.439,-. Hal ini disebabkan rendahnya penyerapan anggaran. Kinerja sudah terlaksana 100%, tetapi pengajuan anggaran tidak 100% dicairkan sampai triwulan ke IV, sehingga banyak kegiatan yang menjadi utang ditahun berikutnya.

Berdasarkan Tabel di atas, Nampak jelas bahwa Dinas PUTRKP Kabupaten Takalar di Periode 2020-2024 ini terdapat 17(Tujuh Belas) Program yang terdani untuk menjalankan layanan kewenangan Dinas.

Hasil Analisa pendanaan Dinas dapat kita klasifikasikan menjadi 3(Tiga) Jenis, yaitu berdasarkan pada :

1. Besaran Pagu Anggaran

- Pagu Anggaran tertinggi : Program Penyelenggaraan Jalan (Rp 407.049.448.681,20)
- Pagu Anggaran terendah : Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (Rp 46.808.820,50)

Hal yang sangat mendasar dan mendukung Program Penyelenggaraan Jalan ini menjadi Program yang mempunyai nilai pagu anggaran tertinggi

adalah bahwa kepemimpinan Bapak Bupati/Wakil Bupati Takalar periode 2017-2022 dan Bapak Pj. Bupati Takalar periode 2023-2024 terdapat Program Prioritas yang beliau emban selama 5 tahun ini dan di antara Program P22 nya adalah Program Perbaikan Infrastruktur Jalan (P6), P6 ini sangat identik dengan Program Penyelenggaraan jalan yang di emban oleh Dinas PUPRKP sehingga Pagu anggaran APBD Kabupaten cukup terkonsentrasi di sini dilanjutkan lagi oleh Penjabat Bupati Takalar selama kurang lebih 2 Tahun masa jabatan

2. Besaran Realisasi Anggaran

- Realisasi Anggaran tertinggi : Program Penyelenggaraan Jalan (Rp 296.519.874.753,-)
- Realisasi Anggaran terendah : Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Dalam Periode 5 Tahun ini, 2017-2022 tercatat dalam SPJ Fungsional Dinas PUPRKP Kabupaten Takalar Realisasi Anggaran terbesar ada pada Program Penyelenggaraan Jalan dengan nilai Rp 296.519.874.753,- hal ini ditunjang dengan Pagu anggaran Program yang diberikan sebesar Rp 407.049.448.681,20

Namun jika kita liat secara terperinci, dapat kita hitung serapan anggaran untuk program ini dalam jangka waktu 5 tahun terakhir sebesar 72,85%, penurunan signifikan ini terjadi di Tahun 2021 yang lalu di mana rasio pagu berbanding realisasi anggaran di nilai 25,21%, penurunan drastis rasio serapan anggaran tersebut sangat didominasi oleh faktor hambatan refocusing anggaran di tahun itu akibat dari pengalokasian anggaran besar-besaran ke program penanganan wabah Virus Covid- 19 yang sudah kita lalui bersama.

3. Besaran Persentase Serapan Anggaran

- Persentase serapan anggaran tertinggi : Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) (99,72%)
- Persentase serapan anggaran terendah : Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (-%)

Ada 15 Program yang terdapat di periode 2017-2021 jika diakumulasi total pagu anggaran yang dialokasikan untuk 15 Program tersebut selama 5

tahun terakhir sebesar Rp 658.036.013.332,18 sedangkan realisasi/ serapan anggaran yang dicapai sebesar Rp 516.676.796.834,04 atau 78,52% serapan anggaran Dinas selama 5 Tahun terakhir

Ada 3 Program yang membuat pencapaian serapan anggaran Dinas hanya sebesar 75,82% dan ketiganya itu pula yang bergerak turun drastis di tahun 2021 dengan sebab yang sudah dijelaskan sebelumnya, program inilah yang menjadi sasaran kebijakan alternatif yang diambil untuk refocusing anggaran skala kabupaten secara umum karena dianggap kondisi waktu itu pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, bangunan pengaman pantai/sungai dan bangunan gedung – gedung dianggap tidak lagi prioritas, tentunya untuk penanggulangan wabah yang dimaksud.

II.2.7. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran adalah pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar, antara lain :

- 1). Masyarakat
- 2). Pihak Swasta

II.2.8. Mitra DPUPTRPKP dalam Memberikan Layanan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan Pelayanan Publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Salah satu pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar, yaitu KKPR dan PBG.

KKPR merupakan singkatan dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. KKPR merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha pertama sebelum perizinan

lingkungan dan perizinan gedung bangunan. KKPR ini memiliki dua fungsi utama sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan. Sedangkan PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Untuk meningkatkan pelayanan terkait pengurusan KKPR dan PBG, Dinas PUTRPKP bermitra dengan beberapa OPD lainnya, diantaranya adalah :

- Kantor Pertanahan ATR/BPN, Kab. Takalar
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kab. Takalar
- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Kab. Takalar
- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Kab. Takalar
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kab. Takalar
- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kab. Takalar

Kemitraan lain yang dilaksanakan oleh Dinas PUTRPKP adalah kepengurusan Komisi Irigasi (KOMIR), di mana kewenangannya dalam hal penentuan, penataan dan pengaturan masa tanam para petani di kabupaten Takalar, PUTRPKP bermitra dengan beberapa OPD lainnya yaitu:

- Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)
- Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan ketahanan Pangan
- Asosiasi Petani di Kabupaten
- GP3A dan IP3A
- Daerah Irigasi di Kab. Takalar

II.2.9. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas PUTRPKP

II.2.9.1. Permasalahan Pelayanan Dinas PUTRPKP

Permasalahan Pembangunan adalah gambaran dari pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara capaian pembangunan dengan yang direncanakan atau kondisi yang ingin dicapai dimasa depan dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi Dinas PUTRPKP menjadi dasar identifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran

pembangunan dan isu strategis daerah yang perlu diselesaikan dalam 5 (lima) tahun kedepan dalam periode tahun 2025 – 2029.

Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar, sebagai berikut :

1. Peningkatan kondisi kemantapan jalan kabupaten.

Belum optimalnya jaringan jalan pendukung pemerataan pembangunan, serta Kapasitas dan Kualitas infrastruktur jalan dan sarana prasarana penunjangnya belum memadai. Hal ini disebabkan karena masih banyak ruas jalan rusak, serta kurangnya bangunan pelengkap jalan (saluran, bangunan dinding penahan tanah).

2. Luas Persawahan yang terlayani Irigasi tersier Kewenangan Kabupaten

Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air dan Pengembangan sistem jaringan sumber daya air, disebabkan karena rawannya banjir permukiman atau lahan pertanian akibat minimnya infratsruktur pengendali banjir pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Belum terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Penanganan sampah masih sangat rendah, serta pengolahan limbah belum maksimal dengan keterbatasan armada. Hal ini disebabkan karena belum dan kurangnya penyediaan pengolahan air limbah domestik. Hal ini mengakibatkan sangat kecilnya Rumah Tangga mendapatkan akses pengelolaan air limbah domestic yang berada dalam cakupan wilayah SPALD Regional.

4. Rendahnya ketersediaan Rumah Layak Huni dan Kawasan Perumahan Permukiman yang berkualitas.

Penentuan kriteria rumah tidak layak huni belum terpadu antar sektor serta masih

banyak masyarakat bermukim di lokasi yang tidak sesuai tata ruang. Selain itu juga belum dilaksanakan identifikasi kawasan dan permukiman kumuh secara menyeluruh. Penentuan kawasan perdesaan dan perkotaan dalam penentuan surat keputusan (SK) kumuh. Permasalahan tersebut disebabkan karena Kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan masih rendah(Pagu Indikatif). Selain itu, pemenuhan Intervensi Rumah Layak huni bagi masyarakat masih bergantung dengan sumber pendanaan lain selain APBD Kabupaten sehingga terkadang intervensi yang dilakukan tidak tepat sasaran terhadap Data base Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten

II.2.9.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan Perangkat Daerah.

Perumusan isu strategis DPUTRPKP didasari pada Potensi Daerah, Isu KLHS, dan Isu lingkungan Dinamis (Isu Global, Nasional, dan Regional) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan untuk menjamin konektivitas antar wilayah.

Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan dari perkotaan hingga ke pelosok perdesaan belum memadai dan perlu peningkatan untuk kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah.

Berdasarkan Potensi Aspek Geografi dan Demografi, dalam konteks kemaritiman, Kabupaten Takalar berada pada Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Dua. posisi ALKI Dua sangat strategis karena menjadi area laut ibu kota negara. Secara regional, Kabupaten Takalar bersama Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros tergabung dalam Kawasan

Strategis Nasional Mamminasata yang merupakan pusat aktivitas perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Kabupaten Takalar bersama Kota Makassar menjadi dua kabupaten/ kota yang seluruh wilayahnya terakomodir ke dalam kawasan strategis nasional tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah belum optimalnya jaringan jalan pendukung pemerataan pembangunan, serta Kapasitas dan Kualitas infrastruktur jalan dan sarana prasarana penunjangnya belum memadai.

2. Peningkatan pengelolaan sumber daya air.

Peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk peningkatan ketersediaan air baku bagi pertanian, rumah tangga dan industri. Berdasarkan potensi Hidrologi, sumber air Kabupaten Takalar meliputi : 1) Air permukaan berupa sungai, yang terdiri dari Sungai Pamukkulu, Sungai Gamanti, dan anak sungai lainnya; 2) Embung Bonto Kadatto, Embung Laikang, Embung Malelaya, Embung Lassang; 3) Daerah Aliran Sungai sebanyak 21 DAS. Kapasitas Air Baku. Sumber air baku di Kabupaten Takalar berasal dari satu sumber yakni Sungai Takalar di Palloko, Kecamatan Polongbangkeng Utara yang dikelola oleh PT Tirta Panrannuangku Takalar dengan kapasitas air baku yang konsisten di angka 290 liter/detik dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2025, potensi sumber dan kapasitas air baku Kabupaten Takalar berpotensi bertambah dengan diresmikannya Bendungan Pammukkulu tahun 2025. Proporsi Sawah Irigasi di Kabupaten Takalar pada Tahun 2018 sampai dengan 2023 terus mengalami peningkatan. Dengan beroperasinya Bendungan Pammukkulu, tentu saja akan meningkatkan proporsi sawah irigasi di Kabupaten Takalar, dengan syarat didukung system irigasi dengan jangkauan yang luas agar distribusi sumber daya air dapat dinikmati di seluruh wilayah Kabupaten Takalar. Permasalahan dari potensi tersebut, belum optimalnya pengelolaan sumber daya air. Perlunya Pengembangan sistem jaringan sumber daya air

3. Penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang layak dan memenuhi aspek kesehatan bagi masyarakat miskin belum terpenuhi.

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Takalar terus mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Salah satu syarat dari sanitasi aman adalah adanya penyedotan lumpur tinja pada rumah-rumah warga. Pelayanan sedot lumpur tinja di Kab. Takalar baru beroperasi pada Tahun 2023.

Dengan adanya layanan IPLT ini, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sanitasi aman pada seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Takalar sehingga mampu menciptakan lingkungan yang sehat. Tetapi, dari potensi tersebut, belum terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Penanganan sampah masih sangat rendah, serta pengolahan limbah belum maksimal dengan keterbatasan armada.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, sesuai peruntukannya dalam peningkatan kebersihan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan dan bangunan, penegakan hukum tata ruang dan bangunan, sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan belum memenuhi target atau amanat peraturan perundang-undangan.

5. Perlunya Update Data Rumah Tidak Layak Huni seiring juga belum optimalnya akses ketidaklayakhunian karna masih tingginya angka rumah tidak layak huni

Data base RTLH di Kabupaten Takalar masih pada kondisi di Tahun 2019 hal ini mengakibatkan tidak akuratnya pengukuran kinerja Bidang urusan Perumahan dan seiring juga Belum optimalnya akses kelayakhunian karena disebabkan karena masih tingginya angka rumah tidak layak huni. Penentuan kriteria rumah tidak layak huni belum terpadu antar sektor serta masih banyak masyarakat bermukim di lokasi yang tidak sesuai tata ruang.

6. Peningkatan Sarana prasarana permukiman untuk menekan presentase permukiman kumuh.

Peningkatan Sarana prasarana permukiman untuk menekan presentase permukiman kumuh dengan memperhatikan kondisi sanitasi, drainase , jalan, serta pengolahan limbah untuk mewujudkan rumah layak huni dan lingkungannya sehingga berimbas pada pengurangan data base Kumuh Kabupaten.

Kondisi yang harus menjadi perhatian karena dampaknya yang sangat signifikan bagi perangkat daerah di masa yang akan datang merupakan definisi isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkatdaerah. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar ataupun sebaliknya, dalam hal ini jika tidak dimanfaatkan akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang.

Isu strategis Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar ditetapkan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *democratic governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan, Dinas dituntut untuk lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar kami rangkum dalam beberapa point sebagai berikut :

1. Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan dari perkotaan hingga ke pelosok perdesaan belum memadai dan perlu peningkatan untuk kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah.
2. Belum optimalnya fungsi drainase gorong-gorong sebagai patus air hujan yang mengakibatkan timbulnya genangan dan pemicu terjadinya banjir.
3. Sarana saluran drainase yang belum tertata akibat peralihan lahan pertanian menjadi lahan permukiman.
4. Peningkatan Sarana prasarana permukiman untuk menekan presentase permukiman kumuh dengan memperhatikan kondisi sanitasi, drainase , jalan kampong serta pengolahan limbah untuk mewujudkan rumah layak huni dan lingkungannya sehingga berimbas pada pengurangan data base Kumuh Kabupaten.
5. Program Pemerintah yang berbasis bantuan stimulan Perumahan atau BSPS perlu penataan dari segi objek penerima bantuannya karena dinilai beberapa tahun terakhir ini tidak tepat sasaran, dari data yang diolah intervensi dari program ini hanya menstimulan 10-12% saja dari data base RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Kabupaten
6. Sarana Persampahan menjadi isu yang hangat di masyarakat di mana Dinas PUPRPKP dituntut berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian mengatasi masalah sampah di Kabupaten.
7. Penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang layak dan

memenuhi aspek kesehatan bagi masyarakat miskin belum terpenuhi.

8. Peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk peningkatan ketersediaan air baku bagi pertanian, rumah tangga dan industri.
9. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya dalam peningkatan kebersihan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan dan bangunan, penegakan hukum tata ruang dan bangunan, sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan belum memenuhi target atau amanat peraturan perundang-undangan.
10. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus/membuat Ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
11. Potensi temuan asset terkait infrastruktur sangat besar seperti jalan, jembatan, Irigasi, Perumahan Permukiman, Sarana Air bersih dan sanitasi karena ruas dan jenisnya beragam serta dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal ini menjadi tantangan di Dinas dan dituntut adanya kolaborasi antar bidang dan pengurus asset internal Dinas.
12. Kekuatan personil ASN di Dinas berdasar analisis Jabatan PUPRPKP masih kekurangan personil sebanyak 30 Orang, berarti ada 30 Jabatan teknis yang seharusnya diisi untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Dinas secara utuh dan berkesinambungan tidak terlaksana dan termasuk pula di dalamnya kebutuhan terhadap ASN yang bersarjana Teknik untuk melaksanakan pekerjaan teknis.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Untuk mewujudkan visi *“Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital”*, misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah secara sistematis dan terukur. Tujuan dan sasaran ini merupakan bentuk operasionalisasi dari 7 (tujuh) misi pembangunan daerah, 7 (tujuh) tujuan pembangunan daerah dan 18 (delapan belas) sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten takalar Tahun 2025 – 2029, yang disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis daerah, potensi dan tantangan pembangunan, serta selaras dengan arah kebijakan nasional, RPJMD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Takalar.

Penetapan Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi dasar dalam perumusan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Adapun **Tujuan Renstra** Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029 adalah **“Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Dasar Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang yang berkelanjutan”**, untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 4 (empat) Sasaran sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur
- Sasaran 2 : Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Sasaran 3 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- Sasaran 4 : Meningkatkan Tata kelola kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Keselarasan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029 terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.

Keselarasan Tujuan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029 Terhadap Tujuan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029

Tujuan RPJMD Tahun 2025 - 2029	Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029	Tujuan/ Sasaran Renstra Bappelitbangda Tahun 2025 - 2029
T.3. Meningkatnya Daya saing Infrastruktur berkelanjutan	S5. Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur Daerah	T1. Meningkatnya daya saing Infrastruktur Dasar Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang yang berkelanjutan
T.4. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan	S.8. Meningkatnya ketahanan air dan energi	S1. Meningkatnya Kualitas layanan Infrastruktur Dasar
		S2. Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
		S3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
		S4. Meningkatnya tata Kelola kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dicapai atau tidak, ditetapkan alat ukur atau indikator tujuan dan sasaran serta target tujuan dan sasaran sampai pada akhir periode Renstra Tahun 2029, dan Tahun 2030 sebagai tahun transisi, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Target Tujuan, Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman											
S5.Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah S8. Meningkatkan ketahanan air dan energi NSPK: Undang - undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang ...; Perbup ttg SOTK	T1. Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Dasar, Perumahan Permukiman, dan Penataan Ruang yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (%)	79,77	79,90	80,63	80,53	82,07	82,78	83,36	
		S1.Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	1,23	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	22,08	23,00	24,00	25,00	27,00	29,00	30,00	
		S2.Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	92,18	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	
		S3.Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	10	10	10	15	15	20	20	
			Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	86,56	100	100	100	100	100	100	
		S4. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas PUTRKP	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat (Nilai)	70	70,5	71,0	71,5	72,0	72,5	73,0	
			Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	80	85	88	90	93	95	100	

III.2. Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas PUTRPKP Tahun 2025-2029, ditetapkan tahapan pembangunan tahunan perangkat daerah sebagai perwujudan kontribusi terhadap tema pembangunan tahunan daerah. Tahapan pembangunan tahunan selama kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030 diharapkan dapat menjadi fokus perangkat daerah pada tahun berkenaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk mewujudkan Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital. Tahun 2030 merupakan masa transisi pembangunan yang dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan estafet pembangunan. Pentahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 - 2030

2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Sistem Layanan Dasar Air Minum, Air Limbah dan Perumahan	Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pekerjaan Umum dan Pemenuhan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Pemantapan Sistem Layanan Dasar Air Minum, Air Limbah serta Layanan Dasar Perumahan	Pemantapan Tata Kelola berintegritas berbasis Pemerintahan Digital	Pemantapan Kualitas Infrastruktur ramah lingkungan

III.2.1 Arah Kebijakan

Menurut Inmendagri No.2 Tahun 2025, arah kebijakan Renstra Perangkat daerah adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan pengertian tersebut maka arah kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan Renstra
S5. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah	Meningkatkannya pemerataan pembangunan infrastruktur dan infrastruktur dasar yang berkualitas diantaranya Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumberdaya air yang mendukung konektivitas antara daratan dengan pulau, antar perdesaan dan perkotaan, peningkatan dan pengembangan pusat – pusat pertumbuhan baru, dan pelayanan dasar yang berkelanjutan	T1. Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Dasar, Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang yang berkelanjutan	S1. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar diarahkan pada Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang berkualitas, berkelanjutan dengan mengedepankan konektivitas wilayah, Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten, Bangunan Pengaman Pantai, Infrastruktur Jalan/Jembatan, Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung ketersediaan air minum, layanan system air limbah, serta layanan dasar perumahan
			S2. Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas dengan melakukan intervensi perbaikan rumah tidak layak huni warga, Kawasan permukiman kumuh kabupaten secara berkelanjutan
			S3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan memaksimalkan potensi objek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); Pengolahan Lumpur Tinja serta Retribusi penyewaan Alat Berat
			S4. Meningkatnya tata kelola kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya tata kelola kinerja diarahkan pada penguatan sistem dan manajemen layanan birokrasi yang efektif dan efisien, termasuk digitalisasi layanan publik dan penguatan manajemen berbasis kinerja. Selain itu, arah kebijakan juga berfokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), serta pengembangan sistem informasi kinerja untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian target kinerja.
S.8. Meningkatnya ketahanan air dan energi	Meningkatnya ketahanan air dan energi diarahkan pada penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu food energy water (FEW) nexus, menjamin ketersediaan air bersih dan energi khususnya listrik bagi seluruh masyarakat, menghindari krisis air, pangan, dan energi; peningkatan kualitas air, udara, pengolahan limbah, dan air laut melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau.	S1. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar		Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar diarahkan pada Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang berkualitas, berkelanjutan dengan mengedepankan konektivitas wilayah, Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten, Bangunan Pengaman Pantai, Infrastruktur Jalan/Jembatan, Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung ketersediaan air minum, layanan system air limbah, serta layanan dasar perumahan

III.2.2. Strategi

Sejalan dengan arah kebijakan sebagai operasionalisasi NSPK yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dirumuskan pula strategi perangkat daerah. Strategi renstra perangkat daerah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah – langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan, sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran renstra perangkat daerah. Strategi ini menjadi jembatan antara visi–misi kepala daerah dengan program dan kegiatan nyata di lapangan atau menjadi acuan dalam mewujudkan prioritas pembangunan daerah. Strategi perangkat daerah ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan perencanaan perangkat daerah tahunan selama lima tahun sesuai dengan fokus atau tema pembangunan tahunan, substansi pada setiap tahapan sifatnya diprioritaskan, namun bukan berarti bahwa pada tahapan lainnya tidak berjalan, penyajian strategi secara lengkap pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Strategi Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026-2030

Operasionalisasi NSPK	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan Renstra	Strategi				
				2026	2027	2028	2029	2030
S5. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah	T1. Meningkatkan Daya saing Infrastruktur Dasar, Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang yang berkelanjutan	S1. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang berkualitas dengan mengedepankan konektivitas wilayah, Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten, Bangunan Pengaman Pantai, Infrastruktur Jalan/Jembatan untuk mendukung konektivitas wilayah; Pembangunan dan Pemeliharaan Layanan Dasar yang berkelanjutan seperti layanan ketersediaan air minum, layanan system air limbah, serta layanan dasar perumahan.	Pembangunan dan rehabilitasi gedung - gedung perkantoran di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan	Peningkatan konektivitas antara daratan dengan pulau, serta antara perdesaan dan perkotaan	Peningkatan konektivitas antara daratan dengan pulau, serta antara perdesaan dan perkotaan	Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya: PKN (Mamminasata) untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung	Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya: PKN (Mamminasata) untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
				infrastruktur untuk konektivitas antar wilayah daratan dan antara daratan dengan pulau, serta antara perdesaan dan perkotaan, diantaranya membangun jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa yaitu Jembatan	Pemenuhan SPM urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman melalui Posyandu Terintegrasi 6 Layanan pada seluruh wilayah Takalar.	Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air	Pembangunan sarana pompanisasi dan pengembangan embung, pembangunan dan perbaikan jalan tani, pembuatan bangunan pengendali banjir dan abrasi, dengan lokus prioritas pada sentra padi sawah dan kawasan pesisir.	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman

				Manongkoki (Takalar) - Bilonga (Gowa), Salaka (Takalar) - Kaluarrang (Gowa).				
				Pemenuhan Infrastruktur Jalan Kabupaten untuk KonektiPitas Wilayah	Pemenuhan Infrastruktur Jalan Kabupaten untuk KonektiPitas Wilayah	Pemenuhan Infrastruktur Jalan Kabupaten untuk KonektiBitas Wilayah	Perluasan Infrastruktur Jalan untuk optimalisasi konektiPitas wilayah	Perluasan Infrastruktur Jalan untuk optimalisasi konektiPitas wilayah
				Penyusunan Rencana Kebijakan Pengembangan Jaringan Jalan	Penyusunan Rencana Kebijakan Pengembangan Jaringan Jalan	Perbaikan dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk jaminan kondisi kemantapan jalan	Optimalisasi Perbaikan dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk jaminan kondisi kemantapan jalan	Monev hasil Perbaikan dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk jaminan kondisi kemantapan jalan
				Pemenuhan Data Layanan SPM	Operasi Layanan IPLT	Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana SPAM dan Sarana air limbah domestic	Optimalisasi Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana SPAM dan Sarana air limbah domestic	Monitoring dan Evaluasi layanan IPLT
				Rehabilitasi Sarana IPLT	Peningkatan Sarana IPLT	Monitoring dan Evaluasi Layanan IPLT	Peningkatan Kapasitas SDM layanan IPLT	Operasi layanan IPLT
				Pemenuhan Sarana SPAM dan AirLimbah Domestik	Pemantauan Kualitas Air Minum	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan berbasis SPM	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan berbasis SPM	Pemenuhan Sarana SPAM dan Air Limbah Domestik
		S2. Meningkatnya	Meningkatnya	Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang layak bagi	Pemenuhan Kebutuhan Rumahyang	Pemenuhan Kebutuhan Rumahyang	Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang layak bagi	Pemenuhan Kebutuhan Rumahyang layak

		Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas dengan melakukan intervensi perbaikan rumah tidak layak huni warga, Kawasan permukiman kumuh kabupaten secara berkelanjutan	masyarakat	layak bagi masyarakat	layak bagi masyarakat	masyarakat	bagi masyarakat
				Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau sesuai karakteristik budaya dan wilayah serta kondisi geogra;is wilayah, terutama pesisir dan kepulauan, serta perdesaan	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau sesuai karakteristik budaya dan wilayah serta kondisi geogra;is wilayah, terutama pesisir dan kepulauan, serta perdesaan	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau sesuai karakteristik budaya dan wilayah serta kondisi geogra;is wilayah, terutama pesisir dan kepulauan, serta perdesaan	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
				Pemeliharaan dan Perbaikan kawasan Permukiman untuk mencegah kondisi permukiman kumuh	Pemeliharaan dan Perbaikan kawasan Permukiman untuk mencegah kondisi permukiman kumuh	Pemeliharaan dan Perbaikan kawasan Permukiman untuk mencegah kondisi permukiman kumuh	Pemeliharaan dan Perbaikan kawasan Permukiman untuk mencegah kondisi permukiman kumuh	Pemeliharaan dan Perbaikan kawasan Permukiman untuk mencegah kondisi permukiman kumuh
				Pemenuhan Database rumah layak huni untuk	Pemenuhan Database rumah layak huni untuk	Pemenuhan Database rumah layak huni untuk	Pemenuhan Database rumah layak huni untuk kepentingan	Pemenuhan Database rumah layak huni untuk

				kepentingan monitoring dan evaluasi kinerja RTLH Kabupaten	kepentingan monitoring dan evaluasi kinerja RTLH Kabupaten	kepentingan monitoring dan evaluasi kinerja RTLH Kabupaten	monitoring dan evaluasi kinerja RTLH Kabupaten	kepentingan monitoring dan evaluasi kinerja RTLH Kabupaten
		S3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan memaksimalkan potensi potensi objek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); Pengolahan Lumpur Tinja serta Retribusi penyewaan Alat Berat	Penguatan Data Base Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Retribusi yang menjadi kewenangan Dinas PUTRPKP	Mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada, dengan meningkatkan pengawasan terhadap potensi penerimaan yang dikelola Dinas PUTRPKP	Mengefektifkan dan menjaga konsistensi sistem pengawasan dan pengendalian Pengelolaan PAD di lapangan untuk memastikan semua penerimaan tercatat dengan baik dan tepat.	Mengefektifkan dan menjaga konsistensi sistem pengawasan dan pengendalian Pengelolaan PAD di lapangan untuk memastikan semua penerimaan tercatat dengan baik dan tepat.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pendapatan Asli Daerah untuk meminimalisir Potensi PAD yang tidak masuk dalam Kas Negara
		S4. Meningkatkan tata kelola kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya tata kelola kinerja diarahkan pada penguatan sistem dan manajemen layanan birokrasi yang efektif dan efisien, termasuk digitalisasi layanan publik dan penguatan manajemen berbasis kinerja. Selain itu, arah kebijakan juga berfokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), serta pengembangan sistem	Mengevaluasi Sistem pengukuran kinerja yang diterapkan saat ini dengan tujuan mereformulasi regulasi terkait pelaporan dan cara pencapaian yang lebih efektif dan tepat sasaran	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan OPD yang bersih, transparan, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya	Penguatan dan Peningkatan kapasitas SDM aparatur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk tujuan peningkatan kualitas Layanan Infrastruktur Daerah	Optimalisasi manajemen risiko dalam rangka mendukung pekerjaan ke P u a n dan evaluasi Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dinas untuk peningkatan akuntabilitas dan integritas Pemerintah Daerah secara Umum

			informasi kinerja untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian target kinerja.	Perbaikan system Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan Keuangan dan Aset/Barang Milik Daerah di OPD berbasis layanan Digital	Perbaikan kualitas Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan Keuangan dan Aset/Barang Milik Daerah di OPD berbasis layanan Digital	Peningkatan Kompetensi Aparatur yang mengelola Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan Keuangan dan Aset/Barang Milik Daerah di OPD berbasis layanan Digital	Monitoring Evaluasi system Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan Keuangan dan Aset/Barang Milik Daerah di OPD berbasis layanan Digital	Pemantapan system Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan Keuangan dan Aset/Barang Milik Daerah di OPD berbasis layanan Digital
				Implementasi aksi monitoring MCP terpadu untuk pencegahan korupsi dengan lokus prioritas pada seluruh perangkat daerah.	Implementasi aksi monitoring MCP terpadu untuk pencegahan korupsi dengan lokus prioritas pada seluruh perangkat daerah.	Implementasi aksi monitoring MCP terpadu untuk pencegahan korupsi dengan lokus prioritas pada seluruh perangkat daerah.	Implementasi aksi monitoring MCP terpadu untuk pencegahan korupsi dengan lokus prioritas pada seluruh perangkat daerah.	Implementasi aksi monitoring MCP terpadu untuk pencegahan korupsi dengan lokus prioritas pada seluruh perangkat daerah.
S.8. Meningkatnya ketahanan air dan energi		S1. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar diarahkan pada Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang berkualitas, berkelanjutan dengan mengedepankan konektivitas wilayah, Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi kewenangan	Pemenuhan/Perbaikan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana-Prasarana Irigasi Kewenangan Kabupaten untuk pemenuhan kebutuhan air baku	Pemenuhan Database Sarana Prasarana Irigasi kabupaten	Pemenuhan/Perbaikan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana-Prasarana Irigasi Kewenangan Kabupaten untuk pemenuhan kebutuhan air baku	Perluasan Sarana-Prasarana Irigasi Kewenangan Kabupaten untuk pemenuhan kebutuhan air baku	Pemenuhan/Perbaikan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana-Prasarana Irigasi Kewenangan Kabupaten untuk pemenuhan kebutuhan air baku
				Penyediaan/Pembangunan SPAM sebagai aksi Pemenuhan Layanan dasar Air Minum di Kabupaten	Pemeliharaan SPAM sebagai aksi Pemenuhan Layanan dasar Air Minum di Kabupaten	Penguatan Database SPAM Kabupaten	Penyediaan/Pembangunan SPAM sebagai aksi Pemenuhan Layanan dasar Air Minum di Kabupaten	Penyediaan/Pembangunan SPAM sebagai aksi Pemenuhan Layanan dasar Air Minum di Kabupaten

			Kabupaten, Bangunan Pengaman Pantai, Infrastruktur Jalan/Jembatan, Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung ketersediaan air minum, layanan system air limbah, serta layanan dasar perumahan					Kabupaten
--	--	--	---	--	--	--	--	-----------

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN

Penyajian perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Program prioritas yang dikategorikan strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan, sementara program prioritas untuk perencanaan strategis merupakan tanggung jawab perangkat daerah

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pelaksanaan program pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
3. Pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
6. Penerapan sub urusan perencanaan dan urusan penelitian yang menjadi kewenangan Bappelitbangda.

IV.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output pada renstra perangkat daerah Tahun 2026 - 2030, sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan yaitu pijakan penyusunan renja perangkat daerah tahun 2030 terdapat 15 (lima belas) Program, 29 (Dua puluh Sembilan) Kegiatan dan 146 (seratus empat puluh enam) Sub kegiatan perangkat daerah yang rencananya dilaksanakan 5 tahun kedepan.

Berikut ini adalah program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran disajikan pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas PUTRKP Tahun 2025-2029 berdasarkan Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman							
- Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Dasar, Perumahan Permukiman, dan Penataan Ruang yang	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan SDA dan pengaman pantai serta pengelolaan sistem irigasi	Tersedianya Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (%)		
					Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))		
					Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))		
					Persentase panjang irigasi kondisi baik (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Jumlah Bendungan yang Dibangun (Bendungan)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Bendungan)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi (Bendungan)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi (Titik)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Breakwater yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Breakwater yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
					Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai	
					Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
					Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
					Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Bendungan)	1.03.02.2.01.0091 - Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	
					Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
					Panjang Breakwater yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.01.0102 - Pembangunan Breakwater	
					Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.01.0105 - Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	
					Panjang Breakwater yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.01.0106 - Rehabilitasi Breakwater	
					Jumlah Bendungan yang Dibangun (Bendungan)	1.03.02.2.01.0111 - Pembangunan Bendungan	
					Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi (Bendungan)	1.03.02.2.01.0112 - Rehabilitasi Bendungan	
					Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tanggul Sungai	
					Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi (Titik)	1.03.02.2.01.0116 - Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	
					Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)	1.03.02.2.01.0119 - Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya pengelolaan layanan jaringan irigasi	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
					Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (UNIT)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi (Dokumen)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.02.0007 - Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02.0026 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	
					Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.02.2.02.0030 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	1.03.02.2.02.0044 - Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	
					Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi (Dokumen)	1.03.02.2.02.0045 - Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)	1.03.02.2.02.0051 - Pembangunan Bendung Irigasi	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (UNIT)	1.03.02.2.02.0054 - Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	
			Meningkatnya akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan	Tersedianya akses air minum aman	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota (%)	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
					Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)	1.03.03.2.01.0027 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	1.03.03.2.01.0030 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Tersedianya layanan Persampahan Regional yang dikembangkan	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
					Jumlah pengelola/operator yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Pengelola)	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	1.03.04.2.01.0009 - Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)	1.03.04.2.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
					Jumlah pengelola/operator yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Pengelola)	1.03.04.2.01.0019 - Pembinaan dan Pengawasan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
			Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%)	1.03.05 - PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
					Tersedianya Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik yang dikelola	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyelenggara)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpu Tinja (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyelenggara)	1.03.05.2.01.0043 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan		Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				Tersedianya Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	1.03.06.2.01.0021 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang ditata		Persentase penataan bangunan gedung (%)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Tersedianya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Sura Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	1.03.08.2.01.0022 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Sura Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya		Persentase penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis kabupaten (%)	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Tersedianya tata bangunan dan lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian daerah		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Terlaksananya penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur (KM)	1.03.10.2.01.0050 - Pelebaran Jalan Menambah Lajur	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	
					Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	1.03.10.2.01.0061 - Pemeliharaan Berkala Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar	
					Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kompetensi tenaga kerja konstruksi		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.01.0015 - Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	
				Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	1.03.11.2.04.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	
					Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Kebijakan penataan ruang yang ditetapkan	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
					dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
					dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
				Penataan Ruang yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan perencanaannya	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	1.03.12.2.02.0006 - Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	
				Informasi penataan ruang yang di koordinasikan dan disinkronkan pemanfaatannya	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		
					Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		
				Pemanfaatan Ruang Daerah yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan pengendaliannya	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang (Laporan)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang (Laporan)	1.03.12.2.04.0005 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang		
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		
		Meningkatkannya Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya jumlah rumah layak huni		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)			
					Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
					Tersedianya data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
					Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0010 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.04 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.04.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Berkurangnya luas kawasan kumuh		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.05.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	
					Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/ Kota yang Ditangan (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisa si (Dokumen)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisa si (Dokumen)	1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
					Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga)	1.04.03.2.02.0011 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
					Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman kumuh		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Rumah Tangga)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
					Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Rumah Tangga)	1.04.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Terselenggaranya PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah			Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)		
					Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah		Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat waktu	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.03.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terlaksananya kegiatan - kegiatan pengelolaan barang milik daerah dengan baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.03.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya layanan kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.03.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terpenuhinya layanan umum perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah untuk menunjang kelancaran kinerja perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya sarana dan prasarana barang milik daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Tersedianya Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik yang dikelola	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyelenggara)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M ³ €/Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (M ³ €/Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M† &/Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (M† &/Hari)	1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M† &/Hari)	1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M† &/Hari)	1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyelenggara)	1.03.05.2.01.0043 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang ditata		Persentase penataan bangunan gedung (%)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Tersedianya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Sura Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	1.03.08.2.01.0022 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Sura Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
					Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat (Nilai)		
					Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)		
				Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat waktu	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.03.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terlaksananya kegiatan - kegiatan pengelolaan barang milik daerah dengan baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.03.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya layanan kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.03.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terpenuhinya layanan umum perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.03.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah untuk menunjang kelancaran kinerja perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya sarana dan prasarana barang milik daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

IV.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan serta besaran pagu indikatif dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif Renstra Dinas PUTRPKP Tahun 2026 - 2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				52.022.691.551,00		55.160.660.599,00		55.785.383.659,00		56.436.937.147,00		57.099.232.823,00		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.674.142.271,00		9.183.413.178,00		9.287.420.091,00		9.395.893.862,00		9.506.156.045,00		
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100,00	100,00	8.674.142.271,00	100,00	9.183.413.178,00	100,00	9.287.420.091,00	100,00	9.395.893.862,00	100,00	9.506.156.045,00	1.03.1.04.0.00.03.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				58.500.000,00		59.000.000,00		59.500.000,00		60.000.000,00		60.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	58.500.000,00	1	59.000.000,00	1	59.500.000,00	1	60.000.000,00	1	60.500.000,00		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00		
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
1.03.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
1.03.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.500.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		1	4.500.000,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.709.821.632,00		6.710.821.632,00		6.711.821.632,00		6.712.821.632,00		6.714.821.632,00		
Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	6.709.821.632,00	12	6.710.821.632,00	12	6.711.821.632,00	12	6.712.821.632,00	12	6.714.821.632,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4	4		4		4		4					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	828	828		828		828		828					
	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.666.821.632,00				6.666.821.632,00			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	828	828	6.666.821.632,00	828	6.666.821.632,00	828	6.666.821.632,00	828	6.666.821.632,00	828	6.666.821.632,00		
1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	15.000.000,00	12	16.000.000,00	12	17.000.000,00	12	18.000.000,00	12	20.000.000,00		
1.03.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya kegiatan - kegiatan pengelolaan barang milik daerah dengan baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4					
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
1.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.03.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				44.750.000,00		45.420.000,00		71.090.000,00		72.430.000,00		73.100.000,00		
Meningkatnya layanan kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		10	44.750.000,00	10	45.420.000,00	22	71.090.000,00	22	72.430.000,00	22	73.100.000,00		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		67		67		67		67		67			
1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				16.750.000,00		17.420.000,00		18.090.000,00		19.430.000,00		20.100.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		67	16.750.000,00	67	17.420.000,00	67	18.090.000,00	67	19.430.000,00	67	20.100.000,00		
1.03.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	22	50.000.000,00	22	50.000.000,00	22	50.000.000,00		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				186.600.000,00		247.800.000,00		257.800.000,00		267.800.000,00		277.800.000,00		
Terpenuhinya layanan umum perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	27	12	186.600.000,00	12	247.800.000,00	12	257.800.000,00	12	267.800.000,00	12	277.800.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	12		12		12		12		12							
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		12				12				12					12		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		12				12				12					12		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	207	300				310				320					330		340
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	12				12				12					12		12
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1				1				1					1		1
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1				1				1					1		1
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1				1				1					1		1
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00						
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00						
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						
1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00						
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00						
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00						
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00						
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00						
1.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00						
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	27	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				148.800.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		230.000.000,00		240.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	207	300	148.800.000,00	310	210.000.000,00	320	220.000.000,00	330	230.000.000,00	340	240.000.000,00		
1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00		
1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00		
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				277.320.639,00		720.231.546,00		784.078.459,00		876.722.230,00		968.824.413,00		
Tersedianya barang milik daerah untuk menunjang kelancaran kinerja perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		10	277.320.639,00	10	720.231.546,00	10	784.078.459,00	10	876.722.230,00	10	968.824.413,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		5		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1		1			
	1.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						10.000.000,00				25.000.000,00			
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		1	10.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				103.320.639,00		170.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		1	103.320.639,00	1	170.000.000,00	1	180.000.000,00	1	190.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				100.000.000,00		386.231.546,00		390.078.459,00		432.722.230,00		514.824.413,00		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)		1	100.000.000,00	1	386.231.546,00	1	390.078.459,00	1	432.722.230,00	1	514.824.413,00		
1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		10	4.000.000,00	10	4.000.000,00	10	4.000.000,00	10	4.000.000,00	10	4.000.000,00		
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	5.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.03.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		105.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	50.000.000,00	1	105.000.000,00	1	150.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00		
1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		5	5.000.000,00	5	10.000.000,00	5	15.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.226.400.000,00		1.226.400.000,00		1.226.400.000,00		1.226.400.000,00		1.226.400.000,00		
Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12	1.226.400.000,00	12	1.226.400.000,00	12	1.226.400.000,00	12	1.226.400.000,00	12	1.226.400.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12				12				12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6	12				12				12			
1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12	1.200.000,00	12	1.200.000,00	12	1.200.000,00	12	1.200.000,00	12	1.200.000,00		
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00		
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.075.200.000,00		1.075.200.000,00		1.075.200.000,00		1.075.200.000,00		1.075.200.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12	1.075.200.000,00	12	1.075.200.000,00	12	1.075.200.000,00	12	1.075.200.000,00	12	1.075.200.000,00		
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				150.750.000,00		153.740.000,00		156.730.000,00		159.720.000,00		164.710.000,00		
Terpeliharanya sarana dan prasarana barang milik daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		10	150.750.000,00	10	153.740.000,00	10	156.730.000,00	10	159.720.000,00	10	164.710.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	39				39				39			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1				1				1			
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)		2				2				2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		3		3		3		3		3			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10		10		15							
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10		10		10							
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				9.750.000,00		10.140.000,00		10.530.000,00		10.920.000,00		11.310.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	39	9.750.000,00	39	10.140.000,00	39	10.530.000,00	39	10.920.000,00	39	11.310.000,00		
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				6.000.000,00		6.600.000,00		7.200.000,00		7.800.000,00		8.400.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		3	6.000.000,00	3	6.600.000,00	3	7.200.000,00	3	7.800.000,00	3	8.400.000,00		
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				15.000.000,00		17.000.000,00		19.000.000,00		21.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)		2	15.000.000,00	2	17.000.000,00	2	19.000.000,00	2	21.000.000,00	2	25.000.000,00		
1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00		
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00		
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	15	10.000.000,00		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				14.636.193.280,00		15.495.504.461,00		15.670.999.077,00		15.854.030.786,00		16.040.080.146,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan SDA dan pengaman pantai serta pengelolaan sistem irigasi	Persentase panjang irigasi kondisi baik (%)	20,00	57,00	14.636.193.280,00	50,00	15.495.504.461,00	50,00	15.670.999.077,00	50,00	15.854.030.786,00	50,00	16.040.080.146,00	1.03.1.04.0.00.03.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5.350.000.000,00		5.350.000.000,00		5.350.000.000,00		5.400.000.000,00		5.550.000.000,00		
Tersedianya Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)		0,25	5.350.000.000,00	0,25	5.350.000.000,00	0,25	5.350.000.000,00	0,25	5.400.000.000,00	0,25	5.550.000.000,00		
	Panjang Breakwater yang Dibangun (KM)		0,10		0,10		0,10		0,10					
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)		0,20		0,20		0,20		0,20					
	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi (Titik)		1		1		1		1					
	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)		1		1		1		1					
	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)		1		1		1		1					
	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)		3		3		3		3					
	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)		1		1		1		1					
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)		1		1		1		1					
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)		1		1		1		1					
	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi (Bendungan)		1		1		1		1					
	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Bendungan)		1		1		1		1					
	Jumlah Bendungan yang Dibangun (Bendungan)		1		1		1		1					
	Panjang Breakwater yang Direhabilitasi (KM)		0,10		0,10		0,10		0,10					
	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)		0,10		0,10		0,10		0,10					
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)		1		1		1		1					
	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		0,02		0,02		0,02		0,02					
	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)		0,50		0,50		0,50		0,50					
1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)		1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		0,02	200.000.000,00	0,02	200.000.000,00	0,02	200.000.000,00	0,02	200.000.000,00	0,02	200.000.000,00		
1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)		3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)		0,50	200.000.000,00	0,50	200.000.000,00	0,50	200.000.000,00	0,50	250.000.000,00	0,50	250.000.000,00		
1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)		1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.03.02.2.01.0091 - Operasi dan Pemeliharaan Bendungan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Bendungan)		1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)		1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)		0,20	200.000.000,00	0,20	200.000.000,00	0,20	200.000.000,00	0,20	200.000.000,00	0,20	200.000.000,00		
1.03.02.2.01.0102 - Pembangunan Breakwater				1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		
Terbangunnya Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun (KM)		0,10	1.300.000.000,00	0,10	1.300.000.000,00	0,10	1.300.000.000,00	0,10	1.300.000.000,00	0,10	1.300.000.000,00		
1.03.02.2.01.0105 - Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)		0,10	200.000.000,00	0,10	200.000.000,00	0,10	200.000.000,00	0,10	200.000.000,00	0,10	200.000.000,00		
1.03.02.2.01.0106 - Rehabilitasi Breakwater				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		
Terehabilitasinya Breakwater	Panjang Breakwater yang Direhabilitasi (KM)		0,10	200.000.000,00	0,10	200.000.000,00	0,10	200.000.000,00	0,10	200.000.000,00	0,10	250.000.000,00		
1.03.02.2.01.0111 - Pembangunan Bendungan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terbangunnya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun (Bendungan)		1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
1.03.02.2.01.0112 - Rehabilitasi Bendungan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terehabilitasinya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi (Bendungan)		1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tanggul Sungai				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		
Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)		0,25	300.000.000,00	0,25	300.000.000,00	0,25	300.000.000,00	0,25	300.000.000,00	0,25	350.000.000,00		
1.03.02.2.01.0116 - Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terehabilitasinya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi (Titik)		1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.03.02.2.01.0119 - Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)		1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		
Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)		1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00		
1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				9.286.193.280,00		10.145.504.461,00		10.320.999.077,00		10.454.030.786,00		10.490.080.146,00		
Tersedianya pengelolaan layanan jaringan irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun (KM)		0,50	9.286.193.280,00	0,50	10.145.504.461,00	0,50	10.320.999.077,00	0,50	10.454.030.786,00	0,50	10.490.080.146,00		
	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (UNIT)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)		1		1		1		1		1			
	Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi (Dokumen)		3		3		3		3		3			
	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		1		1		1		1		1			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)		1		1		1		1		1			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1,78	1		1		1		1		1			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				2.500.000.000,00		2.750.000.000,00		2.750.000.000,00		2.750.000.000,00		2.750.000.000,00		
Terbanggunya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)		1	2.500.000.000,00	1	2.750.000.000,00	1	2.750.000.000,00	1	2.750.000.000,00	1	2.750.000.000,00		
1.03.02.2.02.0007 - Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah				1.586.193.280,00		1.945.504.461,00		2.120.999.077,00		2.254.030.786,00		2.290.080.146,00		
Terbanggunya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun (KM)		0,50	1.586.193.280,00	0,50	1.945.504.461,00	0,50	2.120.999.077,00	0,50	2.254.030.786,00	0,50	2.290.080.146,00		
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)		1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				1.500.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1,78	1	1.500.000.000,00	1	1.750.000.000,00	1	1.750.000.000,00	1	1.750.000.000,00	1	1.750.000.000,00		
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		0,20	200.000.000,00	0,20	200.000.000,00	0,20	200.000.000,00	0,20	200.000.000,00	0,20	200.000.000,00		
1.03.02.2.02.0026 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.03.02.2.02.0030 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.02.2.02.0044 - Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.02.2.02.0045 - Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Rencana Alokasi Air yang Ditetapkan	Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi (Dokumen)		3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
1.03.02.2.02.0051 - Pembangunan Bendung Irigasi				2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terbanggunya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)		1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00		
1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)		1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.03.02.2.02.0054 - Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (UNIT)		1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				2.902.375.800,00		3.072.778.304,00		3.107.579.110,00		3.143.874.531,00		3.180.768.357,00		
Meningkatnya akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota (%)	98,13	98,37	2.902.375.800,00	98,62	3.072.778.304,00	98,87	3.107.579.110,00	99,12	3.143.874.531,00	100,00	3.180.768.357,00	1.03.1.04.0.00.03.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				2.902.375.800,00		3.072.778.304,00		3.107.579.110,00		3.143.874.531,00		3.180.768.357,00		
Tersedianya akses air minum aman	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)		8	2.902.375.800,00	8	3.072.778.304,00	8	3.107.579.110,00		3.143.874.531,00		3.180.768.357,00		
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1,50	1,50		1,50		1,50		1,50					
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)		25		25		25		25		25			
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	135	750		750		750		770		770			
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)		25		25		25		25		25			
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)		3		1		1		1		1			1
1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)		25	200.000.000,00	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00		
1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)		25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00		
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				250.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)		3	250.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.03.2.01.0027 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa				150.000.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00		0,00		0,00		
Terbinanya Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)		8	150.000.000,00	8	150.000.000,00	8	100.000.000,00		0,00		0,00		
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1,50	1,50	1.125.000.000,00	1,50	1.125.000.000,00	1,50	1.125.000.000,00	1,50	1.125.000.000,00	1,50	1.125.000.000,00		
1.03.03.2.01.0030 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1.047.375.800,00		1.367.778.304,00		1.452.579.110,00		1.588.874.531,00		1.625.768.357,00		
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	135	750	1.047.375.800,00	750	1.367.778.304,00	750	1.452.579.110,00	770	1.588.874.531,00	770	1.625.768.357,00		
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				0,00		53.771.637,00		54.380.629,00		55.015.775,00		55.661.393,00		
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	0,00	0,00	0,00	0,00	53.771.637,00	0,00	54.380.629,00	0,00	55.015.775,00	0,00	55.661.393,00	1.03.1.04.0.00.03.00.00 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				0,00		53.771.637,00		54.380.629,00		55.015.775,00		55.661.393,00		
Tersedianya layanan Persampahan Regional yang dikembangkan	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)			0,00	1	53.771.637,00	1	54.380.629,00	1	55.015.775,00	1	55.661.393,00		
	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)				1		1		1		1			
	Jumlah pengelola/operator yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Pengelola)				2		2		2		2			
	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)				1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.04.2.01.0009 - Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)			0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.03.04.2.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				0,00		22.771.637,00		22.380.629,00		23.015.775,00		23.661.393,00		
Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)			0,00	1	22.771.637,00	1	22.380.629,00	1	23.015.775,00	1	23.661.393,00		
1.03.04.2.01.0019 - Pembinaan dan Pengawasan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terbina dan Terawasinya pengelola/operator dalam pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah pengelola/operator yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Pengelola)			0,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				0,00		16.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)			0,00	1	16.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				2.493.026.100,00		2.639.395.116,00		2.669.287.633,00		2.700.463.965,00		2.732.154.303,00		
Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%)	0	98,96	2.493.026.100,00	99,46	2.639.395.116,00	99,96	2.669.287.633,00	100,00	2.700.463.965,00	100,00	2.732.154.303,00	1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.493.026.100,00		2.639.395.116,00		2.669.287.633,00		2.700.463.965,00		2.732.154.303,00		
Tersedianya Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik yang dikelola	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)		432	2.493.026.100,00	432	2.639.395.116,00	432	2.669.287.633,00	432	2.700.463.965,00	432	2.732.154.303,00		
	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyelenggara)		15		10		10							
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)		1											
	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)		1		1									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M†÷/Hari)				1									
	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (M†÷/Hari)		1		1		1		1		1			
	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M†÷/Hari)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)		20		20		20		20		20			
	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)		200		200		200		200		200			
	1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				100.000.000,00		100.000.000,00		0,00		0,00			
Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				718.026.100,00		539.395.116,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (M†÷/Hari)		1	718.026.100,00	1	539.395.116,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00		
1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				0,00		450.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M†÷/Hari)			0,00	1	450.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)		200	50.000.000,00	200	50.000.000,00	200	50.000.000,00	200	50.000.000,00	200	50.000.000,00		
1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.319.287.633,00		1.350.463.965,00		1.432.154.303,00		
Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M†÷/Hari)		1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.319.287.633,00	1	1.350.463.965,00	1	1.432.154.303,00		
1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)		20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00		
1.03.05.2.01.0043 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				75.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		0,00		
Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang mendapatkan Peningkatan kapasitas	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyelenggara)		15	75.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		0,00		
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)		432	300.000.000,00	432	300.000.000,00	432	300.000.000,00	432	300.000.000,00	432	300.000.000,00		
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)		1	100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				1.920.496.000,00		2.033.250.980,00		2.056.278.601,00		2.080.295.206,00		2.104.707.773,00		
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	57,72	90,00	1.920.496.000,00	85,00	2.033.250.980,00	80,00	2.056.278.601,00	75,00	2.080.295.206,00	65,00	2.104.707.773,00	1.03.1.04.0.00.03.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.920.496.000,00		2.033.250.980,00		2.056.278.601,00		2.080.295.206,00		2.104.707.773,00		
Tersedianya Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	100	8	1.920.496.000,00	20	2.033.250.980,00	20	2.056.278.601,00	20	2.080.295.206,00	20	2.104.707.773,00		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)		1											
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	330	400		400		893		931		953			
1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				432.800.000,00		477.650.980,00		500.678.601,00		524.695.206,00		548.707.773,00		
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	330	400	432.800.000,00	400	477.650.980,00	893	500.678.601,00	931	524.695.206,00	953	548.707.773,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.06.2.01.0021 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan				487.696.000,00		1.555.600.000,00		1.555.600.000,00		1.555.600.000,00		1.556.000.000,00		
Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	100	8	487.696.000,00	20	1.555.600.000,00	20	1.555.600.000,00	20	1.555.600.000,00	20	1.556.000.000,00		
1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan				1.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)		1	1.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				0,00		29.873.132,00		30.211.460,00		30.564.319,00		30.922.996,00		
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Instrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (%)		0	0,00	29.873.132	29.873.132,00	30.211.460	30.211.460,00	30.564.319	30.564.319,00	30.922.996	30.922.996,00	1.03.1.04.0.00.03.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0,00		29.873.132,00		30.211.460,00		30.564.319,00		30.922.996,00		
Terselenggaranya Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (UNIT)			0,00	1	29.873.132,00	1	30.211.460,00	1	30.564.319,00	1	30.922.996,00		
	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Ton/hari)				1		1		1		1			
1.03.07.2.01.0007 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				0,00		14.936.566,00		15.105.460,00		15.282.159,00		15.461.483,00		
Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (UNIT)			0,00	1	14.936.566,00	1	15.105.460,00	1	15.282.159,00	1	15.461.483,00		
1.03.07.2.01.0015 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				0,00		14.936.566,00		15.106.000,00		15.282.160,00		15.461.513,00		
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Ton/hari)			0,00	1	14.936.566,00	1	15.106.000,00	1	15.282.160,00	1	15.461.513,00		
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				549.795.300,00		582.074.543,00		588.666.839,00		595.542.259,00		602.531.034,00		
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang ditata	Persentase penataan bangunan gedung (%)	100,00	100,00	549.795.300,00	100,00	582.074.543,00	100,00	588.666.839,00	100,00	595.542.259,00	100,00	602.531.034,00	1.03.1.04.0.00.03.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				549.795.300,00		582.074.543,00		588.666.839,00		595.542.259,00		602.531.034,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	549.795.300,00	1	582.074.543,00	1	588.666.839,00	1	595.542.259,00	1	602.531.034,00		
	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	9.659	10		10		10		10		10			
	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	9.659	50		50		50		50		50			
	1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			200.000.000,00
Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)		1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00		
1.03.08.2.01.0022 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	9.659	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	55.000.000,00	50	55.000.000,00	50	55.000.000,00		
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				249.795.300,00		282.074.543,00		283.666.839,00		285.542.259,00		292.531.034,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	9.659	10	249.795.300,00	10	282.074.543,00	10	283.666.839,00	10	285.542.259,00	10	292.531.034,00		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				5.372.201.100,00		5.687.610.467,00		5.752.025.603,00		5.819.207.221,00		5.887.496.465,00		
Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis kabupaten (%)	100,00	100,00	5.372.201.100,00	100,00	5.687.610.467,00	100,00	5.752.025.603,00	100,00	5.819.207.221,00	100,00	5.887.496.465,00	1.03.1.04.0.00.03.000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				5.372.201.100,00		5.687.610.467,00		5.752.025.603,00		5.819.207.221,00		5.887.496.465,00		
Tersedianya tata bangunan dan lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			5.372.201.100,00	2	5.687.610.467,00		5.752.025.603,00		5.819.207.221,00		5.887.496.465,00		
	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1	1		1		1		1		1			
1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0,00		500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			0,00	2	500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				5.372.201.100,00		5.187.610.467,00		5.752.025.603,00		5.819.207.221,00		5.887.496.465,00		
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1	1	5.372.201.100,00	1	5.187.610.467,00	1	5.752.025.603,00	1	5.819.207.221,00	1	5.887.496.465,00		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				15.066.881.000,00		15.951.478.454,00		16.132.137.211,00		16.320.554.850,00		16.512.078.938,00		
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian daerah	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	63,46	75,00	15.066.881.000,00	80,00	15.951.478.454,00	85,00	16.132.137.211,00	90,00	16.320.554.850,00	95,00	16.512.078.938,00	1.03.1.04.0.00.03.000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				15.066.881.000,00		15.951.478.454,00		16.132.137.211,00		16.320.554.850,00		16.512.078.938,00		
Terlaksananya penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)		2	15.066.881.000,00	2	15.951.478.454,00	2	16.132.137.211,00	2	16.320.554.850,00	2	16.512.078.938,00		
	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)		5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1	11		11		11		11		11			
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)		10		10		10		10		10			
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	5	3,50		3,50		4		4,20		4,50			
	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur (KM)		2		2		2		2		2			
	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)		2		2		2		2		2			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	2	1		1		1		1		1			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)		2		2		2		2		2			
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50			
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)		2		2		2		2		2			
	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	5	5		5		5		5		5			
	1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan						150.000.000,00				150.000.000,00			
Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)		1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1	11	1.050.000.000,00	11	1.050.000.000,00	11	1.050.000.000,00	11	1.050.000.000,00	11	1.050.000.000,00		
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)		10	600.000.000,00	10	600.000.000,00	10	600.000.000,00	10	600.000.000,00	10	600.000.000,00		
1.03.10.2.01.0050 - Pelebaran Jalan Menambah Lajur				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur (KM)		2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00		
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)		2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00		
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				8.716.881.000,00		9.601.478.454,00		9.782.137.211,00		9.970.554.850,00		10.162.078.938,00		
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	5	3,50	8.716.881.000,00	3,50	9.601.478.454,00	4	9.782.137.211,00	4,20	9.970.554.850,00	4,50	10.162.078.938,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)		2,50	500.000.000,00	2,50	500.000.000,00	2,50	500.000.000,00	2,50	500.000.000,00	2,50	500.000.000,00		
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	2	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)		5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00		
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)		2	800.000.000,00	2	800.000.000,00	2	800.000.000,00	2	800.000.000,00	2	800.000.000,00		
1.03.10.2.01.0061 - Pemeliharaan Berkala Jembatan				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)		2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00		
1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)		2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00		
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	5	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				147.032.700,00		155.665.193,00		157.428.182,00		159.266.888,00		161.135.908,00		
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja kosntruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	33,33	100,00	147.032.700,00	100,00	155.665.193,00	100,00	157.428.182,00	100,00	159.266.888,00	100,00	161.135.908,00	1.03.1.04.0.00.03.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				69.532.700,00		77.165.193,00		78.928.182,00		80.766.888,00		82.635.908,00		
Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1	40	69.532.700,00	40	77.165.193,00	40	78.928.182,00	40	80.766.888,00	40	82.635.908,00		
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)		30		30		30		30					
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)		20		20		20		20					
	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1					
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1	40	10.000.000,00	40	10.000.000,00	40	10.000.000,00	40	10.000.000,00	40	10.000.000,00		
1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)		20	22.000.000,00	20	22.000.000,00	20	22.000.000,00	20	22.000.000,00	20	22.000.000,00		
1.03.11.2.01.0015 - Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				10.000.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00		11.500.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.500.000,00	1	11.000.000,00	1	11.500.000,00	1	12.000.000,00		
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				27.532.700,00		34.665.193,00		35.928.182,00		37.266.888,00		38.635.908,00		
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)		30	27.532.700,00	30	34.665.193,00	30	35.928.182,00	30	37.266.888,00	30	38.635.908,00		
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)		2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)		2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				62.500.000,00		63.500.000,00		63.500.000,00		63.500.000,00		63.500.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)		10	62.500.000,00	10	63.500.000,00	10	63.500.000,00	10	63.500.000,00	10	63.500.000,00		
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)		10		10		10		10					
	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	30	10		30		30		30					
	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)		10		10		10		10					
1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				17.500.000,00		18.500.000,00		18.500.000,00		18.500.000,00		18.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	30	10	17.500.000,00	30	18.500.000,00	30	18.500.000,00	30	18.500.000,00	30	18.500.000,00		
1.03.11.2.04.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)		10	17.500.000,00	10	17.500.000,00	10	17.500.000,00	10	17.500.000,00	10	17.500.000,00		
1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)		10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00		
1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)		10	17.500.000,00	10	17.500.000,00	10	17.500.000,00	10	17.500.000,00	10	17.500.000,00		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				260.548.000,00		275.845.134,00		278.969.223,00		282.227.485,00		285.539.465,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	50,00	100,00	260.548.000,00	100,00	275.845.134,00	100,00	278.969.223,00	100,00	282.227.485,00	100,00	285.539.465,00	1.03.1.04.0.00.03.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				125.548.000,00		140.845.134,00		143.969.223,00		147.227.485,00		150.539.465,00		
Kebijakan penataan ruang yang ditetapkan	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	1	10	125.548.000,00	10	140.845.134,00	10	143.969.223,00	10	147.227.485,00	10	150.539.465,00		
	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terpenuhihinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	1	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00		
1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terpenuhihinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				30.548.000,00		45.845.134,00		48.969.223,00		52.227.485,00		55.539.465,00		
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	30.548.000,00	1	45.845.134,00	1	48.969.223,00	1	52.227.485,00	1	55.539.465,00		
1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)		1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Penataan Ruang yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan perencanaannya	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)		2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
1.03.12.2.02.0006 - Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)		2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Informasi penataan ruang yang di koordinasikan dan disinkronkan pemanfaatannya	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)		1				1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)		1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Pemanfaatan Ruang Daerah yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan pengendaliannya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)		1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang (Laporan)		1		1		1		1					
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.03.12.2.04.0005 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang (Laporan)		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				4.407.371.900,00		4.582.490.041,00		4.634.389.115,00		4.688.517.134,00		4.743.537.566,00		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1.031.909.700,00		1.092.494.548,00		1.104.867.615,00		1.117.772.076,00		1.130.889.294,00		
Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	14,04	100,00	1.031.909.700,00	100,00	1.092.494.548,00	100,00	1.104.867.615,00	100,00	1.117.772.076,00	100,00	1.130.889.294,00	1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				75.000.000,00		90.000.000,00		105.000.000,00		120.000.000,00		135.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tersedianya data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1	1	75.000.000,00	1	90.000.000,00	1	105.000.000,00	1	120.000.000,00	1	135.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)														
	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				1
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)		1		1		1		1		1				1
	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				1
	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				1
1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				15.000.000,00		18.000.000,00		21.000.000,00		24.000.000,00		27.000.000,00			
Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	18.000.000,00	1	21.000.000,00	1	24.000.000,00	1	27.000.000,00			
1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				15.000.000,00		18.000.000,00		21.000.000,00		24.000.000,00		27.000.000,00			
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	18.000.000,00	1	21.000.000,00	1	24.000.000,00	1	27.000.000,00			
1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana				15.000.000,00		18.000.000,00		21.000.000,00		24.000.000,00		27.000.000,00			
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	18.000.000,00	1	21.000.000,00	1	24.000.000,00	1	27.000.000,00			
1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				0		0		0		0		0			
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)			0		0		0		0		0			
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				15.000.000,00		18.000.000,00		21.000.000,00		24.000.000,00		27.000.000,00			
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	15.000.000,00	1	18.000.000,00	1	21.000.000,00	1	24.000.000,00	1	27.000.000,00			
1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				15.000.000,00		18.000.000,00		21.000.000,00		24.000.000,00		27.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	18.000.000,00	1	21.000.000,00	1	24.000.000,00	1	27.000.000,00		
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				806.909.700,00		852.494.548,00		849.867.615,00		847.772.076,00		845.889.294,00		
Tersedianya Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)		1	806.909.700,00	1	852.494.548,00	1	849.867.615,00	1	847.772.076,00	1	845.889.294,00		
	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)		1		1		1		1					
	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)		1		1		1		1					
	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	16	10		10		10		10					
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	8	10		10		10		10		10			
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				250.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		300.000.000,00		
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	16	10	250.000.000,00	10	280.000.000,00	10	280.000.000,00	10	280.000.000,00	10	300.000.000,00		
1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				396.909.700,00		409.494.548,00		406.867.615,00		404.772.076,00		382.889.294,00		
Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	8	10	396.909.700,00	10	409.494.548,00	10	406.867.615,00	10	404.772.076,00	10	382.889.294,00		
1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota				60.000.000,00		63.000.000,00		63.000.000,00		63.000.000,00		63.000.000,00		
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)		1	60.000.000,00	1	63.000.000,00	1	63.000.000,00	1	63.000.000,00	1	63.000.000,00		
1.04.02.2.03.0010 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan di lingkungan perumahan bagi korban bencana	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.04.02.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.04.02.2.04 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.04.02.2.04.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah (Dokumen)			50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)		1				1				1			
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.04.02.2.05.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				1.167.061.800,00		1.235.581.615,00		1.249.575.217,00		1.264.169.812,00		1.279.005.029,00		
Berkurangnya luas kawasan kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/ Kota yang Ditangan (%)	10	17	1.167.061.800,00	19	1.235.581.615,00	20	1.249.575.217,00	22	1.264.169.812,00	23	1.279.005.029,00	1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				650.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		550.000.000,00		
Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga)		5	650.000.000,00	10	400.000.000,00	10	400.000.000,00	10	400.000.000,00	5	550.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)		2								2			
1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				550.000.000,00		0,00		0,00		0,00		550.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)		2	550.000.000,00		0,00		0,00		0,00	2	550.000.000,00		
1.04.03.2.02.0011 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha				100.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga)		5	100.000.000,00	10	400.000.000,00	10	400.000.000,00	10	400.000.000,00	5	0,00		
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				517.061.800,00		835.581.615,00		849.575.217,00		864.169.812,00		729.005.029,00		
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)		1	517.061.800,00	1	835.581.615,00	1	849.575.217,00	1	864.169.812,00	1	729.005.029,00		
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)		10		10		10		10					
	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)		3		10		10		10		5			
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				300.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00		420.000.000,00		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)		10	300.000.000,00	10	330.000.000,00	10	330.000.000,00	10	340.000.000,00	10	420.000.000,00		
1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				117.061.800,00		405.581.615,00		419.575.217,00		424.169.812,00		209.005.029,00		
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)		3	117.061.800,00	10	405.581.615,00	10	419.575.217,00	10	424.169.812,00	5	209.005.029,00		
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				92.856.900,00		98.308.657,00		99.422.054,00		100.583.268,00		101.763.627,00		
Meningkatnya Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman kumuh	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	0,00	80,00	92.856.900,00	85,00	98.308.657,00	90,00	99.422.054,00	95,00	100.583.268,00	100,00	101.763.627,00	1.03.1.04.0.00.03.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				92.856.900,00		98.308.657,00		99.422.054,00		100.583.268,00		101.763.627,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)		1	92.856.900,00	1	98.308.657,00	1	99.422.054,00	1	100.583.268,00	1	101.763.627,00		
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)		1				1				1			
	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Rumah Tangga)		16				16				16			
	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			25.000.000,00
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)		1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				32.856.900,00		38.308.657,00		34.422.054,00		35.583.268,00		36.763.627,00		
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)		1	32.856.900,00	1	38.308.657,00	1	34.422.054,00	1	35.583.268,00	1	36.763.627,00		
1.04.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Rumah Tangga)		16	40.000.000,00	16	40.000.000,00	16	40.000.000,00	16	40.000.000,00	16	40.000.000,00		
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				2.115.543.500,00		2.156.105.221,00		2.180.524.229,00		2.205.991.978,00		2.231.879.616,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	100,00	60,00	2.115.543.500,00	75,00	2.156.105.221,00	83,00	2.180.524.229,00	88,00	2.205.991.978,00	100,00	2.231.879.616,00	1.03.1.04.0.00.03.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				2.115.543.500,00		2.156.105.221,00		2.180.524.229,00		2.205.991.978,00		2.231.879.616,00		
Terselenggaranya PSU Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)		1	2.115.543.500,00	6	2.156.105.221,00	8	2.180.524.229,00	10	2.205.991.978,00	15	2.231.879.616,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)		1											
	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)		1		1		1		1					
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	13	10		10		10		10		10			
1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				75.000.000,00		75.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)		1	75.000.000,00		75.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)		1	100.000.000,00	6	100.000.000,00	8	100.000.000,00	10	100.000.000,00	15	100.000.000,00		
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				1.840.543.500,00		1.881.105.221,00		1.980.524.229,00		2.005.991.978,00		2.031.879.616,00		
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	13	10	1.840.543.500,00	10	1.881.105.221,00	10	1.980.524.229,00	10	2.005.991.978,00	10	2.031.879.616,00		

IV.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan

Program prioritas pembangunan berperan untuk mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan waktu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029, olehnya itu program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang merupakan operasionalisasi dari program prioritas pembangunan memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi serta program kerja kepala daerah terpilih.

IV.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam rangka mendukung pencapaian visi nasional sebagaimana dirumuskan dalam Asta Cita, Pemerintah Daerah diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh bidang urusan pemerintahan daerah ke dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Asta Cita menjadi pedoman utama dalam penyusunan arah kebijakan daerah, sehingga seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan. Prioritas Nasional meliputi:

- 1). Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- 2). Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3). Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4). Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5). Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6). Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan; pemerataan ekonomi, dan

- 7). Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
- 8). Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
- 9).

Tabel IV.3
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PUTRKP Tahun 2025
terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 – 2029

Bidang Urusan Perangkat Daerah	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Nasional/ Asta Cita
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	T1. Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Dasar Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang yang berkelanjutan	S1. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Prioritas Nasional 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
		S2. Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	

IV.3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksud, disajikan pada tabel berikut :

1. **Prioritas Pembangunan 1:** Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi
2. **Prioritas Pembangunan 2:** Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal

3. **Prioritas Pembangunan 3:** Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
4. **Prioritas Pembangunan 4:** Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing
5. **Prioritas Pembangunan 5:** Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan
6. **Prioritas Pembangunan 6:** Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital
7. **Prioritas Pembangunan 7:** Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan
8. **Prioritas Pembangunan 8:** Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Tabel IV.4
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PUTRPKP Tahun 2025
terhadap Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2029

Bidang Urusan Perangkat Daerah	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	T1. Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Dasar Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang yang berkelanjutan	S1. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Prioritas Pembangunan 7: Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan
		S2. Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	

IV.3.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Takalar

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

- 1. Prioritas Daerah -1.** Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital
- 2. Prioritas Daerah -2.** Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan, industrialisasi agromaritim, serta hilirasasi pertanian yang didukung peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi berbasis ekonomi digital
- 3. Prioritas Daerah-3.** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas berlandaskan nilai - nilai agama dan budaya.
- 4. Prioritas daerah-4.** Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan
- 5. Prioritas Daerah-5.** Memperkuat harmoni dengan lingkungan melalui peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksud, disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV.5
Keselarasn Tujuan Sasaran Renstra Dinas PUTRPKP Terhadap Prioritas
Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029

Bidang Urusan Perangkat Daerah	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	T1. Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Dasar Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang yang berkelanjutan	S1. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Prioritas Daerah -4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan
		S2. Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Secara lengkap, rangkaian kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan prioritas pembangunan daerah disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.6

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH**

	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman				
1.	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan SDA dan pengaman pantai serta pengelolaan sistem irigasi	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
			1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
			1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
			1.03.02.2.01.0091 - Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	
			1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	
			1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
			1.03.02.2.01.0102 - Pembangunan Breakwater	
			1.03.02.2.01.0105 - Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	
			1.03.02.2.01.0106 - Rehabilitasi Breakwater	
			1.03.02.2.01.0111 - Pembangunan Bendungan	
			1.03.02.2.01.0112 - Rehabilitasi Bendungan	
			1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tanggul Sungai	
			1.03.02.2.01.0116 - Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	
			1.03.02.2.01.0119 - Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	
			1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
			1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung	
			1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
			1.03.02.2.02.0007 - Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	
			1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
			1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			1.03.02.2.02.0051 - Pembangunan Bendung Irigasi	
			1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi	
2.	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			1.03.03.2.01.0030 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
3.	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya layanan persampahan regional	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.04.2.01.0009 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.04.2.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			1.03.04.2.01.0019 - Pembinaan dan Pengawasan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
4.	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
5.	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.07.2.01.0007 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
			1.03.07.2.01.0015 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
6.	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang ditata	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
7.	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
8.	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian daerah	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan	
			1.03.10.2.01.0050 - Pelebaran Jalan Menambah Lajur	
			1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
			1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	
			1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	
			1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	
			1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan	
			1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	
			1.03.10.2.01.0061 - Pemeliharaan Berkala Jembatan	
			1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar	
			1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	
9.	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
			1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.02.0006 - Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	
			1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
			1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
			1.03.12.2.04.0005 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	
			1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	
10.	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
			1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
			1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			1.04.02.2.03.0010 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.04 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.04.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
			1.04.02.2.05.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	
11.	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Berkurangnya luas kawasan kumuh	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.02.0011 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
12.	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman kumuh	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
			1.04.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	
13.	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

III.V.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Ukuran keberhasilan suatu perangkat daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan perangkat daerah tersebut serta perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kepada masyarakat yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai perwujudan tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Renstra Tahun 2025 - 2029. Data dan informasi yang tertuang dalam indikator kinerja utama ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang dan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi atas kebijakan yang dibuat, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

TABEL 4.7

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERIODE TAHUN 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman									
2.	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	%	79,77	79,90	80,63	80,53	82,07	82,78	83,36	
3.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	22,08	23,00	24,00	25,00	27,00	29,00	30,00	
4.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	1,23	1,50	2,00	2,50	3,0	3,50	4,00	
5.	Rumah dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	92,18	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	
6.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	10	10	10	15	15	20	20	
7.	Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	70	70,5	71	71,5	72	73	73,5	
9.	Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	80	85	88	90	93	95	100	

IV.5. Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), SPM (bagi OPD pengampuh SPM), SDG/TPB.

Indikator kinerja daerah memuat target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, Indikator SPM sebagaimana yang termuat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu 17 tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. IUP (Indikator Utama Pembangunan) aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, Capaian indikator kinerja daerah Tahun 2024 serta proyeksi penetapan target indikator kinerja perangkat daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2030 sebagaimana tertuang pada tabel-tabel berikut

IV.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan (Permendagri No 18 Tahun 2020 Pasal 1).

Menu IKK merupakan modul yang dapat menghasilkan format dan data-data profil daerah dalam rangka mempermudah proses penyusunan IKK. Dalam proses penyusunan IKK dibutuhkan data-data capaian yang bisa merepresentasikan kinerja OPD saat ini dan menjadi acuan dalam menyusun IKK tahun berikutnya:

Tabel IV.8

Indikator Kinerja Kunci Dinas PUTRKP

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket.
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	%	36,11	37,00	39,00	42,00	45,00	47,00	50,00	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	23,22	25,00	27,00	29,00	32,00	33,00	35,00	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	74,22	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	98,13	98,12	98,37	98,62	98,87	99,12	100,00	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98,51	98,46	98,96	99,46	99,96	100,00	100,00	
6	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Tingkat Kemantapan Jalan	%	63,46	72,20	73,20	74,20	75,20	76,20	77,20	
8	Rasio tenaga operator / teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	-	0,07	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	
9	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	2,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

12	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	1,05	10,00	15,00	18,00	21,00	23,00	25,00	
13	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	7,81	6,45	5,75	5,05	4,35	3,65	2,95	
14	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	%	-	40,30	40,50	40,70	40,90	50,10	50,30	

IV.7. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu upaya Pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya pada pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Tabel IV.9
Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket.
1	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	98,13%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98,47%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
3	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0,03%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

IV.8. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDG) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan program inisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 dalam mengatasi tantangan global. Program ini bertujuan untuk mendorong perubahan berdasarkan prinsip hak asasi manusia serta memastikan kesetaraan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Tabel IV.10
Sustainable Development Goals (SDGs)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket.
TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN										
	Sasaran 6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	%	28%	28,12%	28,32%	28,52%	28,72%	28,91%	29,11%	
6.4.2	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya.	%								
TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI										
	Sasaran 9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.								
9.1.1. (a)	Kondisi Mantap Jalan Nasional	%	63,46%	63,50%	64%	65%	66%	68%	70%	
TUJUAN 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN										
	Sasaran 11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta menata kawasan kumuh.								
11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	%	72,38%	96,00%	96,50%	97,00%	97,50%	98,00%	98,50%	
11.3.1 (a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.									

BAB V

PENUTUP

V.1 Pedoman Transisi

Renstra PD merupakan dokumen transisi sampai tersusunnya dokumen RPJMD dan Renstra PD periode berikutnya. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 tetap berpedoman pada Renstra PD 2025-2029 sampai tersusunnya dokumen RPJMD hasil pilkada serentak Tahun 2024 dan Renstra PD serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari periode RPJMD dan Renstra PD tersebut (2025-2029). Program-program dan kegiatan pada Tahun 2024 tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2024 tetap mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

V.2 Kaidah Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Sebagai upaya implementasi tujuan dan sasaran Dinas PUTRPKP, arah kebijakan serta melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar Tahun 2025- 2029, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar Tahun 2025- 2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas PUTRPKP;
2. Seluruh Bagian/Bidang/Sekretariat/Seksi di lingkungan Dinas PUTRPKP agar melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Renstra Dinas PUTRPKP selanjutnya menjadi acuan dalam penjabaran rencana tahunan perangkat daerah berupa Renja Dinas PUTRPKP, hingga penyusunan rencana kerja anggaran Dinas PUTRPKP;
4. Pengendalian dan evaluasi serta perubahan Renstra Dinas PUTRPKP dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan kebijakan strategis Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar 2025-2029, maka Kepala Dinas PUTRPKP

Kabupaten Takalar merupakan penanggungjawab dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar tahun 2025-2029.

Hasil implementasi Rencana Strategis Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar tahun 2025-2029 dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar. Hasil tersebut dapat dilihat dalam bentuk Laporan Evaluasi Kinerja Pertriwulan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Rencana Strategis Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan integratif yang terkait dengan seluruh pemangku kepentingan dalam ranah kewenangan pemerintah Kabupaten Takalar, terkhusus pada urusan Administrasi Kependudukan.

Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan daerah yang integratif sektoral dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar tahun 2025-2029.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar telah disusun, yang kemudian dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama empat tahun ke depan. Makakomitmen, konsistensi, kompetensi, kapasitas, kuantitas serta dukungan dari seluruh pihak yang ada di dalam sistem yang pada akhirnya akan menjadi penentu bagi keberhasilan dan kesesuaian pencapaian tujuan dan sasaran yang sebagaimana telah ditetapkan.

Takalar, 26 September 2025

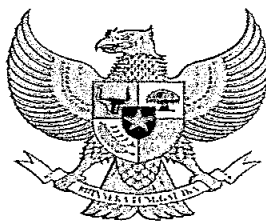
Kepala Dinas,



Budiar Rosal Saleh, S.STP., M.Adm. Pemb.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 198005201998101001



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR

NOMOR 245 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2025-2029

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

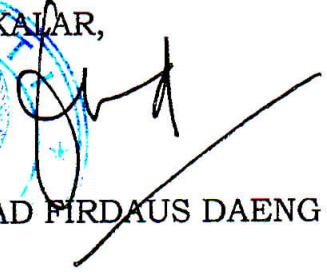
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2024 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2022, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024, Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
 - b. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD;
 - c. menyusun rancangan awal, dan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar;
 - d. menyempurnakan rancangan Rencana Strategis berdasarkan saran dan rekomendasi dari Bappelitbangda;
 - e. kepala perangkat daerah menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan akhir Rencana Strategis berdasarkan saran dan rekomendasi Bappelitbangda.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Bupati Takalar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

- Tembusan.
- 1. Kepala Bappelitbangda Kab. Takalar di Takalar;
 - 2. Masing-masing yang bersangkutan


Tanggal 23.6.2025

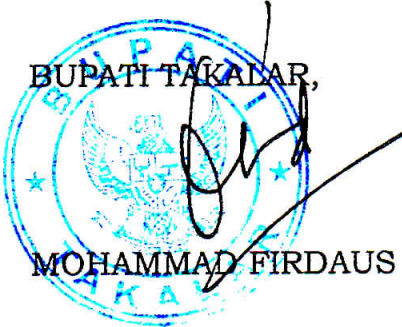
Paraf Komunikasi	
DPUTRPKP	Paraf/Tanggal
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KA. DINAS	

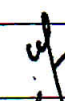


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 245 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM,
TATA RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM,
TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2025-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Ketua Tim	Kepala Dinas PUTRPKP
2.	Sekretaris Tim	Sekretaris Dinas PUTRPKP
3.	Kelompok Kerja	1. Para Kepala Bidang 2. Kasubag Perencanaan 3. Pengolah Data 4. Staf
4.	Tim Pendamping	Tim Perencana Bappelitbangda Kabupaten Takalar

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Paraf Komunikasi	
DPUTRPKP	Paraf/Tanggal
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KA. DINAS	

PELAN
Diketahui / ditanda-tangani oleh

Ketua
Hukum

h

Tanggal: 23.6.2025